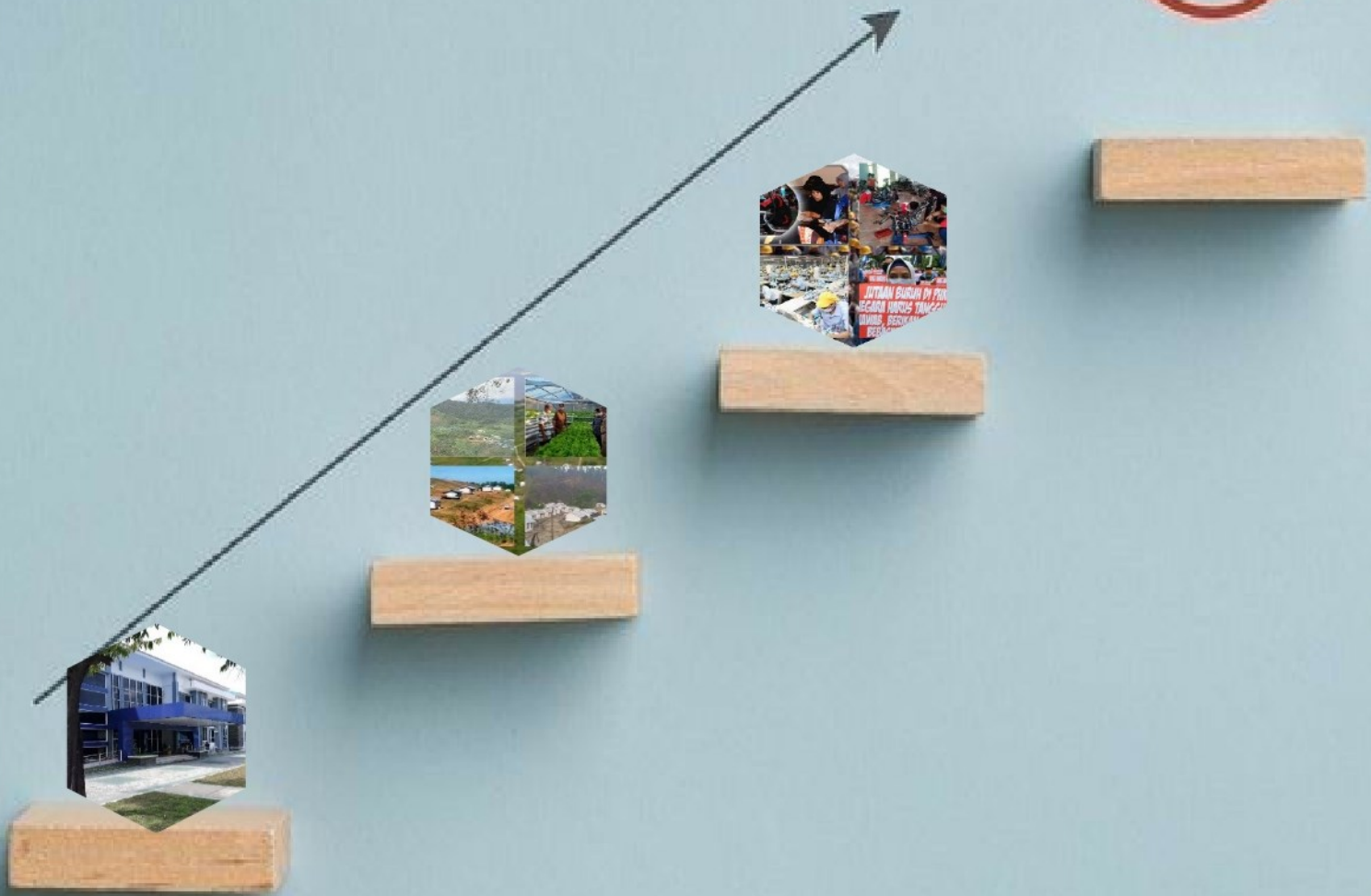


RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH No.7 Telp. (0451) 421844-451560, Fax. (0451) 451560
PALU - SULTENG

Palu, 10 September 2025

Nomor : 000/31/BAPPEDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Dokumen Renstra Tahun 2025-2029

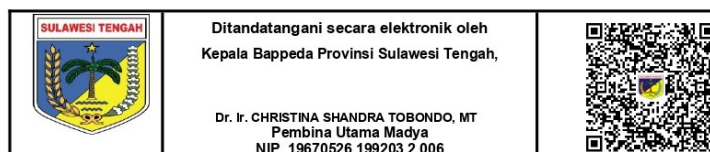
Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000/28/BAPPEDA tanggal 1 September 2025 tentang Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, serta Penetapan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka bersama ini dimohon Bapak/Ibu untuk menyampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen dimaksud agar disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal 12 September 2025.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Sdr. Busman (HP/WA : 0822-9117-4309).

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah; dan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah masalah utama yang kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang didominasi oleh lulusan SMA / SMK dan Universitas (penganggur muda terdidik usia 15 – 24 tahun). Diperlukan upaya penanganan pengangguran baik melalui perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja serta mengupayakan hubungan industrial yang harmonis guna meminimalisasi PHK. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Penyusunan perencanaan strategis menjadi hal yang penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis terkait pembangunan dan pengembangan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Sulawesi Tengah, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam upaya mewujudkan Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2025–2029.

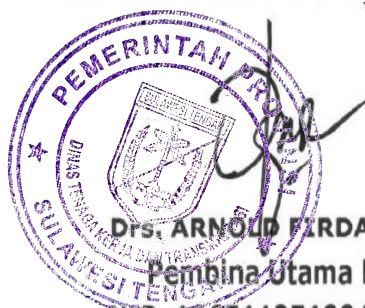
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun 2025-2029.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Palu, 16 September 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. ARNOUD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196511251994031007

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pemetaan Permasalahan PD.....	71
Tabel 2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	75
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	79
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra PD.....	83
Tabel 3.5.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	87
Tabel 4.1	Kerangka Perumusan dan Cascading penyelarasan Tujuan dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	91
Tabel 4.2	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta Cascading penyelarasan Tujuan dan sasaran Renstra.....	92
Tabel 4.3	Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	140
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan pendukung Program Prioritas.....	164
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	164
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	165

DAFTAR ISI

SURAT PERMINTANG PENYAMPAIAN RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 - 2029	ii
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	13
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	41
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	55
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	56
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
b. Isu Strategis.....	73

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029.....	77
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029	78
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029	80
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029.....	84
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
4.1 Uraian Program.....	90
4.2 Uraian Kegiatan.....	90
4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	91
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	160
4.5 Target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	164
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)..	165
BAB V PENUTUP.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang akan diharapkan pada masa mendatang, maka diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu di berbagai sektor dari waktu ke waktu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “*Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah*”.

Amanat UU No.25/2004 tersebut di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. UU No.23/2014 Pasal 263 (Ayat 3) menyatakan bahwa “*RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN*”.

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, peningkatan daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama*, tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah masalah utama yang kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang didominasi oleh lulusan SMA / SMK dan Universitas (penganggur muda terdidik usia 15 – 24 tahun). Tingginya jumlah setengah penganggur, dan kurangnya jiwa kewirausahaan yang ditandai oleh orientasi kerja untuk menjadi pegawai atau pekerja upahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah lebih diwarnai oleh angkatan kerja yang mempunyai persyaratan kerja relatif rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak sehingga berimplikasi pada produktivitas yang rendah.

Oleh karena itu diperlukan upaya penanganan pengangguran baik melalui perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja serta mengupayakan hubungan industrial yang harmonis guna meminimalisasi PHK. Dalam penanganan pengangguran ini

harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industri kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan tugas yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka penyusunan perencanaan strategis menjadi hal yang penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis terkait pembangunan dan pengembangan bidang tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Sulawesi Tengah, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2025–2029.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2025 - 2029. penyusunan Renstra Dinas ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra di Kabupaten/Kota, dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai program yang saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretariat, 5 (lima) Bidang Teknis, dan 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025 - 2029 disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan idiil, dan landasan operasional berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Utara- Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279), terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian (lembaran negara Republik Indonesia nomor 9, tambahan lembaran negara Republik Indonesia no. 5497)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) terakhir sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Kepmendagri nomor 900.1 - 2850 tahun 2025 perubahan ketiga kepmendagri nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 – 2029.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yang dirinci ke dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sesuai masa periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029.

Renstra perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mencapai sasaran pembangunan menengah lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabaran visi, misi dan fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selama periode jabatan, yaitu mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan

- 4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Tugas :

Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan

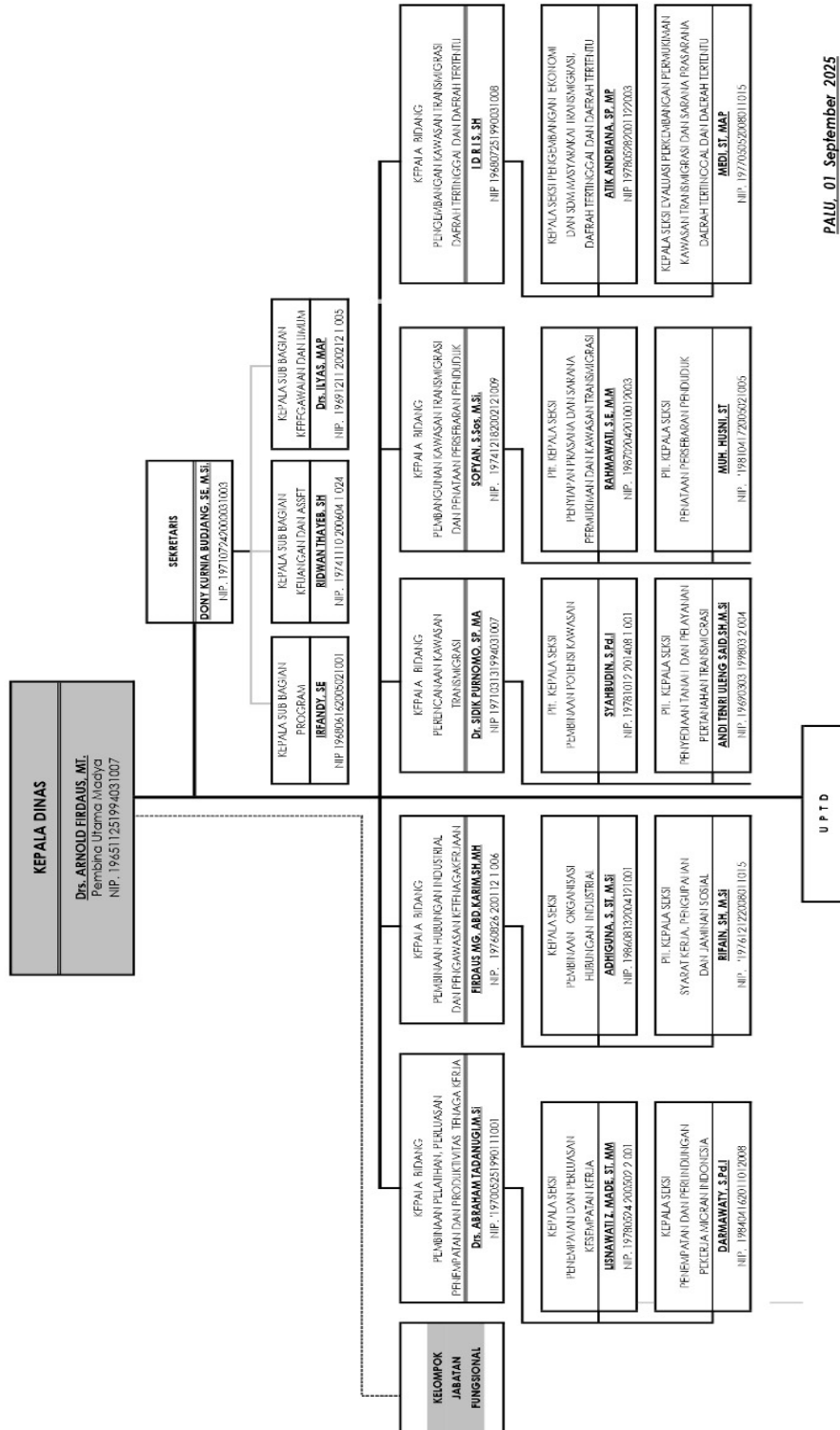
Persebaran Penduduk Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022



PALU, 01 September 2025

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan

(2) penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;

- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.
- (4) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- (5) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.
- (6) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (7) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 - f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.
2. Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja (P5TK)

- (1) Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan

- tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (4) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan tenaga kerja Daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan

- kerja, serta menyusun sistem penyebarluasan informasi pasar kerja skala Provinsi;
- g. memberikan bimbingan teknis dan pelayanan bursa kerja;
 - h. memberikan bimbingan teknis pemberdayaan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - i. melakukan penyuluhan dan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL);
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga, tenaga kerja sarjana serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
 - k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendataan tenaga kerja tingkat Provinsi;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - n. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (5) Seksi Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

- (6) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan serta pelayanan informasi bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana terkait izin tenaga kerja asing;

- i. menerbitkan Rekomendasi pendirian dan perpanjangan Kantor Cabang Perusahaan Pelaksana Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Surat Pengantar Rekrut, Rekomendasi Pemberangkatan PMI;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
 - (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial,

- Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.
 - (4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada poin (3), meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. menghimpun peraturan perundangan-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - e. melaksanakan kebijakan pada kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;

- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi;
- h. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan serta pelaku Hubungan Industrial Skala Provinsi;
- j. melaksanakan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi;
- k. mengoordinasikan hasil pencatatan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pekerja/Buruh Skala Provinsi dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat;
- l. melaksanakan penetapan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh Skala Provinsi untuk duduk dalam Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan Provinsi berdasarkan hasil verifikasi;
- m. melaksanakan koordinasi pembentukan dan pemberdayaan LKS Bipartit di Kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.

- (5) Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (6) Uraian tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
 - d. melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. melaksanakan pencatatan PKWT pada perusahaan yang berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi ;
 - f. melakukan bimbingan aplikasi pengupahan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ;
 - g. menyusun dan menetapkan upah minimum/upah sektoral Provinsi, Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan ;
 - h. melaksanakan koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala Provinsi;

- i. melaksanakan koordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan tentang kepesertaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.

4. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi (PKT)

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembagunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi,

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;

- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

(3) Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi.

(4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;

- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise potensi kawasan transmigrasi;
 - e. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan transmigrasi;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.
- (5) Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.
- (6) Uraian tugas Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, serta pengelolaan tanah;
 - e. melaksanakan pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
5. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk (PKTP3)
- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan

transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - b. pembinaan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dan Penataan Persebaran Penduduk.
- (3) Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, penyerasian lingkungan.
- (4) Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - e. melaksanakan standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, serta penyerasian lingkungan;

- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.
- (5) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi barang milik Negara.
- (6) Uraian tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada poin (6) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;

- d. melaksanakan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan serta adaptasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi administrasi barang milik Negara;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan persebaran penduduk;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk.
6. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu (PKTDT)
- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.
 - (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya,

- dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - b. pembinaan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.
- (3) Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.

- (4) Uraian tugas Seksi Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - d. melaksanakan produksi, pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, promosi serta publikasi;
 - e. melaksanakan kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
 - f. melaksanakan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;

- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu.
- (5) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu.
- (6) Uraian tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan

Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- d. melaksanakan evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, maka disusunlah Organisasi dan Tatalaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Program
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Asset dan
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Pembinaan, Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b. Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminas Sosial;
4. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi
5. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk membawahi:
 - a. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Penataan Persebaran Penduduk
6. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi:

- a. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- b. Seksi Evaluasi Pengembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu.

Sedangkan UPT Dinas; dan Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri atas :

7. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Palu
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Morowali
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja .

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung sejumlah personil dengan rincian sebagai berikut :

b.1 Susunan Kepegawaian/SDM

Kondisi kepegawaian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah per 1 Juli 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai sesuai Eselon

Pegawai	Posisi per 1/07/2025
Eselon II	1 Orang
Eselon III	7 Orang
Eselon IV	15 Orang
Fungsional Tertentu	37 Orang
Pelaksana	63 Orang
PPPK	101 Orang
Jumlah	224 Orang

Tabel 2.2 : Susunan Personil Disnakertrans Prov. Sulteng menurut Golongan :

Pegawai	Posisi per 1/07/2025
Golongan I	0 Orang
Golongan II	15 Orang
Golongan III	75 Orang
Golongan IV	33 Orang
PPPK	101 Orang
Jumlah	224 Orang

Tabel 2.3 : Keadaan pegawai menurut Pendidikan pada Disnakertrans Prov. Sulteng

S3	S2	S1	SARJANA MUDA	SLTA	SLTP	SD
1	26	160	5	32	1	0

b.2 Aset yang Dikelola

Dalam mendukung kegiatan tugas pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung beberapa peralatan dan perlengkapan yang memadai sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 2.4

**Prasarana dan Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025**

No	Uraian Sarana	Jumlah / Satuan	Keterangan
1	Tanah	7 Bidang	
2	Gedung kantor	3 Areal / kawasan	
3	Rumah Dinas	35 Unit	
4	Kendaraan Roda Empat/mobil	10 Unit	
5	Kendaraan roda tiga /kaiser	3 Unit	
6	Kendaraan roda dua /sepeda motor	95 unit	
7	Mobil pelatihan bergerak	3 unit	
8	Mesin las listrik	2 unit	
9	Caps	3 unit	
10	Scanner	2 Unit	
11	Mesin ketik manual	4 Unit	
12	Lemari	167 Unit	
13	Filling besi	12 Unit	
14	Brank case	3 Unit	
15	Mesin Absensi / finger print	3 Unit	
16	Genset	3 Unit	
17	Mesin Pompa air	7 Unit	

18	Meja kerja	322 Unit	
19	Kursi	901 Unit	
20	AC	108 unit	
21	Kipas angin	29 Unit	
22	Dispenser	15 Unit	
23	TV	23 Unit	
24	Loudspeaker	7 Unit	
25	Sound Sistem	8 Unit	
26	Camera film	10 Unit	
27	Handycam	7 Unit	
28	Komputer desktop	73 Unit	
29	Laptop	58 Unit	
30	Notebook	48 Unit	
31	Hardisk External	16 buah	
32	Printer	117 buah	
33	UPS	3 buah	
34	Pryektor	37 buah	
35	Mic wireless	27 buah	
36	amplifier	2 buah	
37	Alat komunikasi	55 buah	
38	Alat lab.	1 Unit	
39	CCTV	9 Unit	
40	Mesin press	3 Unit	
41	Perkakas bengkel	13 Unit	
42	Mesin potong rumput	3 Unit	
43	Mesin jahit	22 unit	
44	Peralatan Studio Visual	2 Unit	
45	Mixer	2 buah	

46	Hand drill	1 buah	
47	Mesin bordir	5 buah	
48	Mesin foto copy	2 buah	
49	Kulkas	1 buah	
50	Alat rumah tangga	5 unit	
51	Alat dapur	1 Set	
52	Ruang pertemuan/aula	3 buah	
53	Lapangan olahraga	1 buah	

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2024 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi. Selengkapnya diuraikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut ini.

No	Indikator	Tahun Periode RPJMD 2021 - 2024										Keterangan		
		Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		%	Target	Capaian	%	Target	Capaian		%			
		2020	2021						2022	2023			2024	
A IKU RPJMD PROV. SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026														
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,77	3,76	99,71	3,07	3,00	102,35	2,84	2,95	96,15	2,54	2,94	84,14	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
B INDIKATOR KINERJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH														
1	Angka partisipasi angkatan kerja	69,75	71,20	102,08	69,36	69,99	100,91	70,23	69,85	99,46	70,10	71,10	101,43	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,44	70,56	101,61	72,28	69,99	96,83	73,87	69,85	94,57	74,79	71,10	95,06	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
3	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,23	96,24	100,01	96,93	96,99	100,06	97,16	97,05	99,89	97,46	97,06	99,59	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
4	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/TK)	9,373	9,614	103	10,055	51,497,866	512,146	10,646	166,355,376	1,562,595	11,322	172,497,485	1,523,627	menggunakan rumus lampiran permendagri 86 tahun 2017
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	68,4657	68,9708	100,738	68,69	66,38	96,63149	68,96	66,50	96,44	68,99	69,01	100,02	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
6	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	28,44	29,33	103,129	29,46	42,65	144,77	29,52	41,25	139,74	29,59	41,02	138,62	Target Tercapai (terlampaunya target karena pemulihan pasca covid di Sulteng lebih cepat, shg angka kesempatan kerja lebih besar)
7	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	288	125	43,4028	156	179	115	138	135	98	165	168	102	menggunakan rumus lampiran permendagri 86 tahun 2017 (2022 : range tahun 2022-2023 akibat pandemi covid, kasus perselisihan ketenagakerjaan meningkat)
8	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	64,93	60	92,4072	62	113	182	66	66	100	73	64	88	Target Tercapai (2022 : aduan kasus yang masuk di mediator hubungan industriai meningkat)

		Tahun Periode RPJMD 2021 - 2024										Keterangan	
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%			
		2020	2021	72,0981	10,74	23,98	233,28	11,48	19,15	166,81			
											2022		2023
	9) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,87	10	72,0981	10,74	23,98	233,28	11,48	19,15	166,81	736,06	Target Tercapai (target 2022-2024 terlalu rendah karena penentuan target mempertimbangkan pengaruh pandemi covid terhadap pembangunan ketenagakerjaan pada tahun kedepannya)	
	10) Keselamatan dan perlindungan	86	78	90,6977	79,00	79,16	100,20	80,00	81,05	101,31	0,30	Target Tercapai (2024 tidak tercapai km fokus pemeriksaan perusahaan hanya terbatas pada perusahaan2 besar)	
	11) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	75000	80000	106,667	85.000	93.864	110	156.000	157.000	101	277.257	166	Target Tercapai (pertumbuhan penduduk yang bekerja/angkatan kerja pasca covid lebih besar daripada yang diproyeksikan)
	12) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	89	78	87,6404	81	113	139,5062	84	90	107,1429	168	193,1034	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
	13) Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)	72	197	2662,5	2100	1080	514,2857	1150	2710	235,6522	542	22,48963	menggunakan rumus lampiran pemendagri 86 tahun 2017 (2022&2024: basis data target dan capaian kinerja dalam satuan jumlah perusahaan terperiksa tidak mencapai yg diharapkan karena pemeriksaan perusahaan diprioritaskan pada yang berpengaruh secara nasional, contoh kasus IMIP)
	14) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	75	78	104	81	304	375,3086	250	90	36	8,75	10,05747	menggunakan rumus lampiran pemendagri 86 tahun 2017 (2022: pengujian peralatan perusahaan masiv dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan; 2023-2024 : diprioritaskan untuk perusahaan yang mengalami kasus kecelakaan ketenagakerjaan yang berdampak secara nasional)
	15) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	400	224	56	246	256	104,065	271	272	100,369	471	143,5976	Target Tercapai (pagu anggaran masih bisa mengcover jumlah tenaga kerja yang dilatih)

No		Indikator	Tahun Periode RPJMD 2021 - 2024												Keterangan				
			Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		%		Target		Capaian		%		Target			Capaian		%	
			2020	2021			2022	2023	2022	2023			2024	2024				2024	2024
		16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (orang)	43	48	111,628		53	148	279,2453		58	112	193,1034		64	190	296,875	Target Tercapai (pagu anggaran masih bisa mengcover jumlah tenaga kerja yang dilatih)
		17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)	105	92	87,619		84	1,315,00	1,565,48		92	1,500	1,630,43		101	1,780	1,762,38	Target Tercapai (fokus penda untuk meningkatkan enterpreneurship angkatan kerja, shg anggaran yg dilakokasikan juga besar)
		18	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jansostek/BPJS TK (persen)	68	70	102,941		73	82,43	112,9178		74	83,05	112,2297		75	100	133,3333	Rata rata realisasi pencapaian target pada tahun 2022 - 2024 sesuai ekspektasi
		19	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	89	90	101,124		91	43,30	47,58		92	99,77	108,45		93	65,69	70,64	Besaran target pada penyusunan RPJMD Kematin Sudah kita Minta direvisi tetapi tidak dirubah; 2022&2024 : karena perfijungan kenaikan UMP menggunakan variabel data yang diberikan oleh pemerintah pusat (kementerian keyenagakerjaan)
		20	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	50	50	100		53	51,42	97,02		56	55,65	99,38		59	52,25	88,56	Capaian berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian ketransmigrasian
		21	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	35,00	25,53	72,94		25,89	67,80	261,82		27,24	68,00	249,60		28,85	50,39	174,66	Capaian berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian ketransmigrasian
		22	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	1000	1567	156,7		1738	590	33,94707		1909	620	32,47774		2080	383	18,41346	Jumlah UPT bina pada awal penyusunan RPJMD sebanyak 7 UPT, berkurang tinggal 3 UPT bina di akhir 2024
C		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN PERANGKAT DAERAH																	

No	Indikator	Tahun Periode RPJMD 2021 - 2024												Keterangan
		Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		%	Target	Capaian		%	Target	Capaian		%		
		2020	2021			2022	2023			2023	2024			
1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	9,30	9,87	106,13	238,90	10,00	23,89	10,74	19,15	178,31	11,48	89,80	782,22	Target Tercapai ; pencapaian realisasi kinerja yang selalu diatas ekspektasi dikarenakan tingginya jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebagai akbat membaiknya iklim ivestasi di Sulawesi Tengah serta meningkatnya belanja publik pemerintah terutama pada sektor infrastruktur sehingga serapan angkatan kerja juga tinggi .
2	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	45,23	47,00	103,91	128	50,00	64,06	51,32	57,50	112,04	52,08	32,14	61,71	Pada tahun pertama dan kedua periode RPJMD (2022 dan 2023) paket Pelatihan kluster kompetensi yang disertai uji kompetensi banyak dilaksanakan karena ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi maupun yang bersumber dari pembiayaan APBN, sedangkan pada tahun ketiga (2024), unit kerja perangkat daerah (UPT Dinas) yang menangani pelatihan kluster kompetensi diserahkan pengelolaannya ke kementerian Ketenagakerjaan sejak bulan april 2024 .
3	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja	18,50	19,25	104,05	76,52	25,00	19,13	26,32	21,50	81,69	27,08	23,45	86,60	Pencapaian realisasi indikator kinerja ini sepanjang periode RPJMD cukup baik namun perlu perhatian dan perbaikan yang lebih baik di tahun mendatang
4	Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0,025	0,030	120,000	248,485	0,033	0,082	0,037	0,086	232,432	0,040	0,075	186,695	Target Tercapai ; pencapaian realisasi kinerja yang selalu diatas ekspektasi dikarenakan tingginya penyediaan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu dengan menciptakan wirausaha baru yang tangguh.

No	Indikator	Tahun Periode RPJMD 2021 - 2024												Keterangan			
		Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		%		Target		Capaian		%		Target			Capaian		%
		2020	2021	96,00	95,65	66,00	63,13	68,00	64,15	94,34	73,00	38,10					
													2022		2023	2024	
5	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	62,50	60,00	96,00	95,65	66,00	63,13	68,00	64,15	94,34	73,00	38,10	52,18	Pencapaian Realisasi indikator kinerja ini sepanjang periode RPJMD (2022 - 2024) belum memuaskan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai fungsional mediator hubungan industrial yang ada masih sangat kurang, oleh karena itu perlu perhatian dan perbaikan yang lebih baik di tahun mendatang			
6	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,66	63,85	100,30	151,50	64,91	98,34	66,16	98,90	149,48	67,41	104,70	155,31	Realisasi pencapaian target indikator kinerja ini sangat memuaskan, hal ini merupakan perwujudan meningkatnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan serta meningkatnya jumlah perusahaan yang berkategori mempunyai tata kelola kerja yang layak.			
7	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantauan	33,50	35,25	105,22	114,27	37,50	42,85	50,00	60,00	120,00	75,00	66,67	88,89	Realisasi pencapaian target indikator kinerja ini sangat memuaskan, hal ini merupakan perwujudan meningkatnya fasilitasi pengembangan / pembinaan UPT bina dalam rangka perwujudan kawasan transmigrasi sebagai kawasan hunian, ekonomi dan sosial budaya yang baru.			
8	Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)	1.900	2.000	105	113	2.100	2.381	2.150	2.264	105	2.200	2.126	97	Realisasi pencapaian target indikator kinerja ini sangat memuaskan, hal ini merupakan perwujudan meningkatnya fasilitasi pengembangan / pembinaan UPT bina dalam rangka perwujudan kawasan transmigrasi sebagai kawasan hunian, ekonomi dan sosial budaya yang baru.			

Kinerja pelayanan perangkat daerah juga dipengaruhi besaran realisasi penganggaran pada setiap program dan kegiatan setiap tahunnya dalam periode RENSTRA berjalan. Berikut ini diuraikan penganggaran pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam periode RENSTRA 2022 – 2024 pada tabel 2.6 berikut ini;

Tabel 2.6

Anggaran Belanja Langsung APBD per Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1,	Meningkatnya kualitas pembangunan ketenagakerjaan provinsi Sulawesi Tengah				
1.1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.443.732.625	1.443.732.625	1.289.244.024
		<i>Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</i>	51,32%	51,32%	55,5
		<i>Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah</i>	26,32%	26,32%	35,5
1.1.1		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.288.322.550	2.466.269.823	1.231.134.024
		<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun</i>	250 Orang	250 Orang	250 Orang
1.1.2		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	0	166.500.000	35.650.000
		<i>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang telah</i>	6%	8%	10%
1.1.3		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	97.871.000	115.345.000	22.460.000
		<i>Tingkat pertumbuhan UMKM yang difasilitasi peningkatan</i>	8%	8%	10%
1.1.4		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	57.539.075	241.633.050	0
		<i>Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
1.2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0	232.372.000	14.276.000
		<i>Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</i>	46,15%	48,15%	50,50%
1.2.1		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0	14.276.000	14.276.000
1.3		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.735.535.565	23.715.613.665	12.513.545.456
		<i>Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja</i>	0,037%	0,037%	0,07%
1.3.1		Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	11.295.961.816	23.141.099.265	12.152.604.956
1.3.2		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah	36.194.500	12.350.000	9.920.000
		<i>Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya</i>	4 Unit	4 Unit	8 Unit
1.3.3		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	82.580.000	251.346.200	215.852.800
		<i>Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja</i>	80 Orang	80 Orang	80 Orang
1.3.4		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	115.954.500	276.807.800	115.642.700
		<i>Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitasi pelindungan</i>	80 Orang	80 Orang	80 Orang
1.3.5		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	34.010.400	19.525.000
		<i>Jumlah RPTKA perpanjangan yang di fasilitasi pengesahannya</i>	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	620.080.000	1.150.926.700	1.483.319.850
		<i>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)</i>	68%	70%	72%
1.4.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	250.000.000	100.000.000	74999800
		<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama</i>	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan
1.4.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah	244.000.000	781.926.950	1.213.319.850
		<i>Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik</i>	100 Orang	100 Orang	100 Orang
		<i>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</i>	165 Kasus	165 Kasus	165 Kasus

No	Sasaran	Program/Kegiatan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
		<i>Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah</i>	80%	84%	88%
1.4.3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	130.080.000	293.999.950	170000000
		<i>Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja</i>	90%	92%	95%
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek</i>	81%	85%	90%
1.5		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	727.720.000	1.162.453.795	1.324.687.550
		<i>Persentase jumlah perusahaan yang diawasi</i>	60,08%	63,08%	68%
1.5.1		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	727.720.000	1.162.453.795	1.324.687.550
		<i>Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan</i>	60%	63%	65%
1.6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.273.416.417	33.099.701.607	28.029.311.576
		<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	B	B	B
2,	Meningkatnya kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah				
2.1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	777.640.500	415.469.647	1.000.974.025
		<i>Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun</i>	65%	69%	72%
2.1.1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	777.640.500	415.469.647	1.000.974.025
		<i>Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi</i>	4%	4%	4%
2.2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.497.440.000	7.323.023.800	2.554.304.789
		<i>Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya</i>	37,50%	40,50%	45,50%
2.2.1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.440.800.799	2.554.304.789	113.503.990
		<i>Jumlah penduduk yang ditata pesebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi</i>	200 KK	200 KK	200 KK
2.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	962.542.157	1.922.458.210	971.543.666
		<i>Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan</i>	45%	50%	60%
2.3.1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap	962.542.157	1.922.458.210	971.543.666
		<i>Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada</i>	3 Unit SP	3 Unit SP	3 Unit SP

Pada tabel penganggaran pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di atas dapat dijelaskan bahwa penganggaran pada Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki proporsi rata rata penganggaran dalam tiga tahun periode Renstra sebesar 28, 42 %. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian

pemerintah provinsi sulawesi tengah dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui usaha perluasan kesempatan kerja (penciptaan wira usaha baru). Program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas memiliki proporsi penganggaran rata rata 2,73 %. Anggaran ini di fokuskan pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi kerja para pencari kerja. Kelemahan angkatan kerja kita adalah masih rendahnya tingkat kompetensi kerja terutama yang berkaitan dengan kompetensi di sektor industri pengolahan. Program pembinaan hubungan industrial memiliki proporsi penganggaran rata rata sebesar 2,05 %. Anggaran ini difokuskan pada sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi . Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang kondusif sehingga sengketa antara pengusaha dan pekerja yang mengarah pada perselisihan hubungan industrial dapat diminimalisir. Program pengawasan ketenagakerjaan memiliki proporsi penganggaran rata rata sebesar 2,04. Fokus penganggarannya diarahkan pada sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja. Pembangunan Ketransmigrasian melalui Program perencanaan kawasan transmigrasi , Program pembangunan kawasan transmigrasi dan program pengembangan kawasan transmigrasi memiliki proporsi penganggaran rata rata sebesar 1,51 % ; 7,22 % dan 2,35 %. Penganggarannya difokuskan pada sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan, Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat

dan Transmigran, Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman dan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.

d. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah

Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi memiliki beberapa layanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya , antara lain :

1. Layanan mediasi perselisihan hubungan industrial , yaitu layanan penyelesaian perselisihan aduan permasalahan antara pekerja dengan majikan / pengusaha.
2. Layanan pemeriksaaan norma kerja dan norma k3 di perusahaan , yaitu layanan pemeriksaan penerapan norma k3 dan norma kerja di perusahaan yang diajukan oleh serikat pekerja perusahaan apabila merasa ada pelanggaran oleh perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan.
3. Layanan peningkatan kompetensi pencari kerja melalui program pemagangan dalam negeri dan pelatihan kompetensi, yaitu layanan pemagangan di perusahaan bagi pencari kerja.
4. Layanan fasilitasi penempatan tenaga kerja terdaftar , yaitu layanan mempertemukan antara pencari kerja terdaftar dengan pemberi kerja melalui job fair.
5. Layanan Disabilitas, yaitu layanan fasilitasi bimbingan penempatan, peningkatan kompetensi dan bimbingan karir bagi penyandang disabilitas.
6. Layanan ketransmigrasian, yaitu layanan bagi warga transmigrasi binaan maupun non binaan terkait penyelesaian sengketa pertanahan dilokasi pemukiman transmigrasi.
7. Layanan informasi publik tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yaitu layanan akses informasi terbatas terkait

data data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi dunia pendidikan dan penelitian.

2. Permasalahan dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a.1 Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan, karena kesempatan kerja tidak hanya mempunyai arti ekonomis, tetapi juga mempunyai arti kemanusiaan, yaitu menumbuhkan harga diri. Ini mempertegas prinsip bahwa setiap upaya pembangunan dalam bidang ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, agar setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Bangsa Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tengah pada khususnya, sedang dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan yaitu masalah penganggur terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.

Tenaga kerja dibentuk menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar

kerja lokal dan global. Kebijakan penguatan SDM secara inklusif dan ditempuh dari sisi permintaan dan penawaran, disertai oleh fasilitasi mobilitas pekerja. Dari sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital bagi 206,6 juta angkatan kerja. Pasar tenaga kerja memerlukan transformasi struktural untuk menciptakan pekerjaan yang menawarkan produktivitas dan pekerjaan lebih tinggi. Dari sisi penawaran, keahlian angkatan kerja utamanya disiapkan dengan (i) percepatan untuk pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; (ii) penguatan pelatihan re-skilling dan upskilling serta integrasi soft skills bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi, dan (iii) pembentukan regulasi penguatan vokasi yang memberikan kepastian sinergitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri. Selanjutnya, dari sisi permintaan, fasilitasi mobilitas pekerja termasuk untuk mengisi pasar kerja global dilakukan utamanya melalui: (i) penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja termasuk tenaga kerja rentan mencakup penguatan jaminan sosial yang komprehensif serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja; (ii) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif; (iii) penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja; (iv) percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas, yang juga menjadi tulang punggung system pengembangan keahlian; dan (v) penguatan keterampilan digital untuk penguasaan seluruh keahlian.

Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja merupakan upaya melanjutkan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi aspek *supply* (pendidikan dan pelatihan) dan upaya menghubungkan vokasi dengan dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Fokus penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu (a) penguatan infrastruktur esensial dan pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); (b) penguatan pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang pendidikan dan pelatihan vokasi (guru sekolah menengah kejuruan, dosen vokasi, dan instruktur). Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, ekosistem ketenagakerjaan juga akan diperkuat untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan pendidikan menengah vokasi, (b) penguatan pendidikan tinggi vokasi, (c) penguatan pelatihan vokasi, serta (d) penguatan produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mencapai 1.516.347 jiwa dari jumlah angkatan kerja tahun 2020 sebesar 1.575.728 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah Penduduk Usia Kerja Sulawesi Tengah sebanyak 2.269.144 jiwa, Angkatan Kerja sebanyak 1.575.728 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,44 %. Penduduk usia kerja didominasi usia 20 – 59 tahun sebesar 76,39 % . Angkatan Kerja (AK) Sulawesi Tengah tahun 2020 didominasi usia 20 – 49 tahun sebesar 69,38 %. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2020 jika dirinci menurut jenis kelamin pada tahun 2020, maka Penduduk Usia Kerja (PUK) laki laki sebesar 1.159.743 Jiwa dan Perempuan sebesar 1.115.395 jiwa, Angkatan Kerja (AK)

laki laki sebesar 990.166 jiwa dan Angkatan Kerja (AK) Perempuan sebesar 585.562. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki laki sebesar 88,77 % dan TPAK perempuan sebesar 52,50 % . Penduduk yang Bekerja (PYB) laki laki sebesar 951.427 jiwa dan PYB Perempuan sebesar 564.920 jiwa. Lebih besarnya TPAK laki-laki dari TPAK perempuan sejalan dengan keadaan angkatan kerja yang disebabkan antara lain karena laki-laki fungsinya sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga.

Hingga Agustus tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Tengah adalah sebesar 3,77 persen, Penganggur Terbuka (PT) sebesar 59.381 jiwa , dengan komposisi jenis kelamin laki laki sebesar 38. 739 jiwa (65,24 %) dan perempuan sebesar 20.642 jiwa (34,76 %).

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja dan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Untuk mengurangi pengangguran pada umumnya dan pengangguran terdidik pada khususnya adalah dengan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program

Pembinaan Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan serta Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Permasalahan di sektor ketenagakerjaan yang masih krusial hingga saat ini antara lain:

1. Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang tersedia.
2. Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dan melalui perluasan kesempatan kerja.
3. Belum optimalnya penanganan kesempatan kerja bagi kaum milenial gen Z yang tidak lanjut Pendidikan.

a.2 Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan tenaga kerja di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun tenaga kerja sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja, Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, pendekatan ini dilakukan melalui (a) penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran dan inklusif melalui kartu kesejahteraan, dengan (i) peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial yang sesuai dengan kondisi kerentanan; (ii) perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan terdigitalisasi. reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui peningkatan literasi Jaminan Sosial, penjangkauan aktif kepesertaan, penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan. Untuk mencapai perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemerintah memastikan program yang terintegrasi dan saling melengkapi. Salah satu Upaya agar perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi dapat terbangun dan terlaksana, dilakukan penyusunan payung hukum pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, untuk memastikan kebijakan yang harmonis, komprehensif, dan berkesinambungan, program yang tersinkronisasi, pembagian peran dan kewenangan lintas sektor yang konsisten, serta penguatan kondisi perlu yang dibutuhkan untuk memastikan program yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Sosial ditujukan untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan konsep dan mekanisme pelaksanaan perlindungan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Permasalahan di sektor Hubungan industrial yang masih krusial hingga saat ini antara lain:

1. Belum optimalnya perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik
2. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan
3. Belum optimalnya perlindungan adaptif jaminan sosial bagi pekerja rentan seperti buruh, tani dan nelayan

a.3 Kondisi Ketransmigrasian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025–2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi. Tujuan pembangunan kewilayahan Adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan Pembangunan daerah. Strategi pengembangan wilayah secara khusus dituliskan pada Bab IV Arah Pembangunan Wilayah serta menjadi Lampiran IV Arah Kebijakan Kewilayahan per Provinsi

yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2025–2029. Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Transmigrasi untuk periode 2025-2029 berfokus pada pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan data dan informasi ketransmigrasian, sebagai bagian dari pencapaian visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Fokusnya meliputi revitalisasi kawasan transmigrasi prioritas, pendataan dan digitalisasi data, pengembangan kawasan Transpolitan, serta pemanfaatan transmigran sebagai komponen Cadangan. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama.

Pokok-pokok kegiatan Pembangunan Transmigrasi 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaannya. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertama, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, Kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.

Kedua, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah antara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam “**menggerakkan dan mengintegrasikan**” Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan

kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

Pembangunan kawasan transmigrasi diawali dengan proses penyediaan tanah dan tahapan perencanaan. Pada akhir tahun 2024 telah tersedia rencana pembangunan kawasan Transmigrasi berupa WPT/LPT sekurang kurangnya terdapat 25 dokumen perencanaan yang meliputi: Rencana pembangunan KPB, Rencana pembangunan SP sebagai pusat SKP, Rencana pembangunan SP, Rencana pembangunan prasarana dan sarana dengan melibatkan masyarakat sehingga lebih berkualitas dalam menjaga konsistensi pemanfaatan ruang yang terintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.

Sejalan dengan Pembangunan ketransmigrasian yang dilaksanakan melalui pola berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan transmigrasi disusun secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi transmigrasi. Saat ini, di Sulawesi Tengah terdapat (13) tiga belas kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi oleh pemerintah pusat, yaitu :

1. Kawasan Lalundu – Bamba Kaenu di Kabupaten Donggala
2. Kawasan Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong
3. Kawasan Tampolore di Kabupaten Poso
4. Kawasan Ulubongka di Kabupaten Tojo Una Una
5. Kawasan Palolo di Kabupaten Sigi
6. Kawasan Mamosalato di Kabupaten Morowali Utara
7. Kawasan Bungku di Kabupaten Morowali
8. Kawasan Banggai Selatan di Kabupaten Banggai Laut
9. Kawasan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan

10. Kawasan Basidondo di Kabupaten Toli Toli
11. Kawasan Air Terang di Kabupaten Buol
12. Kawasan Pantai Barat di Kabupaten Donggala
13. Kawasan Kulawi Raya di Kabupaten Sigi

Pada program pembangunan Ketransmigrasian, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan atau penyediaan lahan transmigrasi di desa-desa telah menyebabkan tingginya konversi hutan produktif menjadi lahan terbangun. Pengaruh dari aktifitas perkotaan turut mengubah mata pencaharian masyarakat desa dari pertanian menjadi jasa dan perdagangan. Penataan ruang kawasan perdesaan yang masih belum optimal memberikan peluang bagi kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan juga harus terkonversi, sehingga menimbulkan dampak berkurangnya sumber daya air. Selain itu, isu menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup desa-desa yang disebabkan oleh ekspansi dari perusahaan-perusahaan tambang dan sejenisnya telah mengubah fungsi lingkungan hidup menjadi area pertambangan yang dapat menimbulkan konflik sumber daya alam, penurunan kualitas pelayanan pertanahan. Adanya HPH (Hak Pengelolaan Hutan) telah mengubah pengalih fungsian hutan secara masif. Sejalan dengan hal tersebut proses pelayanan pertanahan yang di mulai dari pencadangan areal sampai terbitnya sertifikat hak milik (SHM) bagi warga transmigrasi tidaklah mudah sesuai harapan, dimana sampai dengan tahun 2024 ada sekitar 10 lokasi yang di usulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan belum dapat di terbitkan. Hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang semula masuk dalam areal penggunaan lain telah berubah fungsi menjadi kawasan hutan. Saat Ini masih terdapat kurang lebih 13.000 bidang lahan yang belum tersertifikasi hak milik yang disebabkan antara lain oleh lokasi masuk kawasan hutan, tumpang tindih dengan hak guna usaha, dan juga peta indikatif hutan primer. Program transmigrasi mempunyai kontribusi terhadap program legalisasi aset berupa

penyelesaian Hak Pengelolaan, sertifikasi kepemilikan lahan bagi transmigran, serta mendukung Redistribusi aset bagi petani gurem melalui program transmigrasi baru yang diarahkan pada 13 kawasan yang ada di Sulawesi Tengah.

Program Transmigrasi Umum di Sulawesi Tengah sudah dimulai sejak tahun 1962 (Prapelita) hingga sekarang ini dengan jumlah total yang telah berhasil ditempatkan sebesar 58.545 KK atau 240.071 jiwa yang tersebar di 182 UPT. Melalui program Transmigrasi berbagai dampak positif bagi pembangunan daerah Sulawesi Tengah telah dirasakan manfaatnya, diantaranya pada berbagai kawasan terpencil yang sangat sulit dijangkau, saat ini bahkan telah berubah menjadi kantong-kantong produksi hasil-hasil pertanian terutama tanaman pangan yang menunjang dan mempercepat Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tahap - tahap swasembada pangan antara lain Kawasan Parigi, Ongka, Toili, Bunta, Poso Pesisir, Sausu, Lalundu dan kawasan kawasan lainnya.

Capaian yang telah diraih dalam Pembangunan Ketransmigrasian sampai saat ini antara lain jumlah rumah transmigrasi yang di bangun sebanyak 58.545 unit, 182 unit kantor desa dan beberapa panjang jalan ,Sarana dan Prasarana Drainase, Jalan, Jembatan, Goron-Gorong, dan termasuk rumah pintar dan tugu serta jalan boulevard yang ada di Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan sebagainya.

Sampai dengan pertengahan tahun 2024 terdapat 10 lokasi transmigrasi /UPT binaan yang berada di wilayah kabupaten yang masih perlu di bina baik dari segi sarana prasarana, ekonomi, sosial budaya dan pembinaan lainnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat transmigrasi umumnya bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah, dibandingkan di masyarakat di perkotaan. Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta

perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi.

Saat ini penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu transmigrasi yang eksklusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Secara geografis kawasan transmigrasi terdiri atas permukiman baru transmigrasi, desa-desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. Realita yang berkembang sekarang adalah masyarakat transmigrasi yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun, masyarakatnya tidak hanya pada daerah asal namun sudah melibatkan penduduk setempat, bahkan ada beberapa lokasi /UPT yang transmigrannya berasal dari penduduk setempat. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penempatan warga transmigrasi yang ada di UPT Torire Kabupaten Poso.

Pelaksanaan penempatan transmigrasi tidak berkembang optimal karena pengembangannya hanya didasarkan pada Satuan Pemukiman (SP), belum mempertimbangkan keterpaduan, keterbatasan pengelolaan infrastruktur dan minim akses ke daerah luar dan akibatnya tidak semua permukiman transmigrasi tersebut mampu mencapai tingkat perkembangan yang optimal seperti yang diharapkan. Hal ini dari jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang dibangun dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan mulai tahun 2019 sampai 2024 terjadi penurunan baik lokasi yang dibangun maupun jumlah penduduk yang ditempatkan. Pada tahun 2019 lokasi yang dibangun sebanyak 4 lokasi dan pada tahun 2024 hanya 1 lokasi yaitu UPT Torire.

Pada pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah:

- 1) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;

- 2) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (*clear and clean*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang);
- 3) Masih ada lahan usaha transmigrasi yang belum tersertifikasi hak milik;
- 4) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 5) Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, sering terjadinya mutasi pengelola program transmigrasi di daerah yang tidak mempunyai kompetensi di bidang ketransmigrasian;
- 6) Keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi belum proporsional;
- 7) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil Penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah kabupaten/Kota sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki 3 Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal kabupaten (kondisi hingga akhir tahun 2019), Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antar wilayah.

Keberhasilan program pembangunan daerah tertinggal erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek pembangunan. Kualitas SDM diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Akhir tahun 2020 pencapaian IPM di daerah tertinggal sebesar 68,04, jauh di bawah rata-rata nasional yakni 73,29. Rendahnya IPM di daerah tertinggal terkait dengan rendahnya aksesibilitas terhadap sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di desa yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan desa lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada desa yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan pulau-pulau kecil, desa pedalaman, serta desa rawan bencana. Disamping itu, perlu perhatian khusus pada wilayah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun kesalahan kebijakan pembangunan sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2025-2029

No.	Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
1.	Masih Tingginya Angka Pengangguran Penduduk Angkatan Kerja	1. Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja terutama kaum milenial gen Z 2. Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dan melalui perluasan kesempatan kerja.	1. Belum sebandingnya rasio daya tampung pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas yang diadakan dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten maupun Provinsi 2. Terbatasnya sarana parasarana pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, baik di Kab. maupun Provinsi. 3. Terbatasnya fasilitasi kegiatan Uji Jenjang Kompetensi (UJK) bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. 4. Kurangnya Instruktur Pelatihan Kerja Yang Memiliki Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 1. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat 2. Jumlah SDM yang menangani penempatan/pengantar kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi penempatan 3. Rendahnya jiwa wirausaha di kalangan angkatan kerja muda 4. Masih minimnya upaya perluasan kesempatan kerja berbasis padat pekerja.

No.	Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
2.	Masih rendahnya tingkat perlindungan adaptif sosial terhadap pekerja dan maraknya perselisihan industrial antara pekerja dengan pengusaha.	Belum optimalnya perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan	5. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan kurangnya koordinasi kelembagaan penempatan TKI 1. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial 2. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja masih kurang akibat terbatasnya jumlah tenaga fungsional mediator hubungan industrial 1. Kurangnya pegawai pengawas KK baik pegawai pengawas KK umum maupun spesialis dibandingkan dengan jumlah perusahaan 2. Kurangnya pemahaman perusahaan / pengusaha tentang regulasi norma ketenagakerjaan 3. Kurang proporsionalnya penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan
3.	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi	1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan sosial ekonomi kawasan transmigrasi	1. Kurangnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dari segenap stakeholder. 2. Kurangnya SDM di bidang Ket transmigrasian dalam menunjang pembangunan ket transmigrasian

No.	Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
			3. Kurang proporsionalnya penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi baru.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannyapun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Pembangunan ketransmigrasian dan daerah tertinggal memiliki makna yang strategis

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi.

Isu isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Bonus demografi penduduk Angkatan kerja di provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai menunjukkan perwujudannya.
2. Serbuan / masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang masif terhadap pasar kerja formal di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya sulit di bendung.
3. Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul akibat regulasi / aturan tentang ketenagakerjaan / hubungan kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah serta jaminan perlindungan adaptif sosial bagi pekerja rentan yang masih rendah.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal pada sektor formal masih tertinggal dibanding dengan daerah (provinsi) lain.
5. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dengan daerah / kawasan transmigrasi yang kurang ditangani secara komprehensif.

Penentuan isu isu strategis perangkat daerah diinterpretasikan berdasarkan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu faktor kajian lingkungan hidup strategis serta isu lingkungan global, nasional dan regional juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan isu isu strategis tersebut. Berikut ini digambarkan pemetaan penentuan isu isu strategis dalam tabel berikut ini

TABEL 2.2 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Demografi	Masih Tingginya Angka Pengangguran Penduduk Angkatan Kerja	Peningkatan kualitas daya saing SDM	Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Penyandang Disabilitas	Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan terutama pendidikan vokasional dan pelatihan kompetensi kerja	Kualitas Sumberdaya Manusia belum Berdaya Saing, antara lain meliputi Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang tersedia, 2. Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dan melalui perluasan kesempatan kerja, dan 3. Belum optimalnya penanganan kesempatan kerja bagi kaum milenial gen Z yang tidak lanjut Pendidikan.
Hilirisasi industri pertambangan dan sektor perikanan / kelautan	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor pengolahan industri pertambangan di daerah	Peningkatan pengawasan penggunaan TKA pada industri pengolahan pertambangan di daerah	Tingkat persaingan industri global dan ancaman perang dagang, perang tarif perdagangan	Memperkuat sistem industri nasional terutama yang berkaitan dengan industri padat teknologi dan strategis	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Belum optimalnya perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik serta Belum optimalnya perlindungan adaptif jaminan sosial bagi pekerja rentan seperti buruh, tani dan nelayan
Ketersediaan RTRW dan dukungan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis nasional dan Provinsi seperti kawasan transmigrasi	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur menghubungkan antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perkembangan demografi global dan isu pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan wilayah perbatasan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, masih terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar di kawasan transmigrasi dan Sengketa pertanahan dalam kawasan transmigrasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD 2025 - 2029

3.2. Sasaran Renstra PD 2025 - 2029

3.3. Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029

3.4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029



BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan dan Sasaran yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengejawantahan dari tujuan dan sasaran pada misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (DR. Anwar Hafid, M.Si dan dr Reny A. Lamadjido M.Kes) periode 2025 – 2029 yang diampuh, yaitu :

Misi 1 : ***‘Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja’***, dengan tujuan **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja**, dan dengan sasaran **Meningkatnya partisipasi angkatan kerja**.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja;
2. Meningkatkan kesejahteraan warga transmigran

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar;
2. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja;
3. Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi;

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya angka partisipasi kerja	Meningkatkan kesejahteraan pekerja		Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	2.728,75	2.810,61	2.894,93	2.981,78	3.071,23	3.163,37	3.258,27	Tenaga Kerja
	Meningkatkan kesejahteraan warga transmigran		Rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)	2.391,67	2.487,33	2.586,83	2.690,30	2.797,91	2.909,83	3.026,22	Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	89,799	34,928	35,9763	37,056	38,167	39,3123	40,4916	
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	17,343	18,037	18,7583	19,509	20,289	21,1006	21,9446	
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	50,39	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,32	

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

3.3. Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah harus memiliki pedoman /acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur.
2. Peningkatan kapasitas diri Tenaga Kerja (skill, knowledge dan attitude) dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan segenap stakeholder.
5. Peningkatan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri.
6. Peningkatan fasilitasi perluasan / penyerapan tenaga kerja bagi pencari kerja unskill / warga miskin pada sektor padat karya / usaha produktif.
7. Meningkatkan peran kelembagaan bipartit / tripartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pemenuhan hak hak pekerja (pemenuhan jaminan sosial).
9. Meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) pekerja.
10. Penguatan peran fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di tempat kerja.
11. Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru.
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Strategi pencapaian indikator sasaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya di formulasikan ke dalam tabel berikut ini.

Strategi pembangunan daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan strategi serta program kerja Perangkat Daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan

program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang dituangkan melalui Trisula pembangunan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam strategi tematik-sektoral yang saling terkait dan komplementer. Keseluruhan strategi tematik-sektoral ini akan dirumuskan lebih lanjut ke dalam strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dalam bentuk penahapan pembangunan, dengan menyesuaikan pada potensi wilayah, permasalahan mendasar, serta prioritas pembangunan daerah sehingga mampu mempercepat pencapaian target nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara inklusif dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pembangunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Strategi				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan warga transmigrasi				
Sasaran : Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar				
<i>Pemetaan sektor unggulan dan kebutuhan tenaga kerja</i>	<i>Peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan segenap stakeholder</i>	<i>Peningkatan kapasitas diri tenaga kerja (Skill, knowledge, attitude) dengan pelatihan berbasis kompetensi</i>	<i>Peningkatan fasilitas perluasan / penyerapan tenaga kerja bagi pencari kerja unskill / warga miskin pada sektor padat karya/usaha produktif</i>	<i>Peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri</i>
Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja				
<i>Pemetaan sektor permasalahan ketenagakerjaan</i>	<i>Peningkatan sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak pekerja (pemenuhan jaminan sosial)</i>	<i>Peningkatan taraf hidup (kesejahteraan) pekerja</i>	<i>intensif melakukan pengawasan di semua sektor usaha</i>	<i>memastikan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan</i>
Sasaran : Meningkatnya kualitas perkembangan wilayah transmigrasi				
<i>Peningkatan kualitas perencanaan, kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</i>	<i>Peningkatan kualitas perencanaan, kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</i>	<i>Peningkatan kualitas perencanaan, kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</i>	<i>Peningkatan kualitas perencanaan, kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</i>	<i>Peningkatan kualitas perencanaan, kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</i>

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Dalam implementasinya, kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat diklat.
2. Peningkatan akses tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi , uji sertifikasi kompetensi terhadap berbagai sektor profesi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan beberapa tahun kedepan serta pelatihan / bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas.
3. Peningkatan mutu sarana & Prasarana di Satpel Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Kerja Palu melalui Mou sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini (Up grading tenaga pelatihan dan akreditasi lembaga pelatihan).
4. Penyesuaian kejuruan di Satpel Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Kerja Palu melalui Mou dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri dimasa datang tetapi juga mendukung pemenuhan tenaga kerja untuk pemanfaatan potensi daerah.
5. Pembentukan forum kerjasama / nota kesepahaman antar lembaga pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan dunia usaha / industri terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja terlatih.

6. Optimalisasi peran bursa kerja (job fair, BKK dan bursa kerja online) dan lembaga penyalur tenaga kerja lokal dan migran (LPTKS dan PJTKI) serta dunia usaha / industri melalui pola kemitraan / MOU.
7. Penguatan peran fungsional pengantar kerja / Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD dan pekerja migran.
8. Fasilitasi peningkatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi pra dan purna penempatan.
9. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan / penciptaan wirausaha baru dan penerapan TTG berbasis enterprenuership yang dilaksanakan di daerah berdasarkan keunggulan daerah.
10. Meningkatkan pembinaan organisasi pekerja (SP, SB) dan pengusaha.
11. Penguatan koordinasi dengan segenap jejaring (BPJS dan organisasi pengusaha).
12. Peningkatan efektivitas dewan pengupahan provinsi / kabupaten dalam penentuan UMP / UMK dan Upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten.
13. Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan penerapan kepatuhan terhadap norma kerja, norma K3 dan lingkungan kerja.
14. Meningkatkan kapasitas aparatur Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
15. Peningkatan Fasilitasi pembangunan / pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi bagian pertumbuhan ekonomi melalui program agropolitan, agrowisata dan agroindustri.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar, ekonomi dan sosial budaya kawasan / unit pemukiman transmigrasi (UPT) bina.

Strategi pencapaian indikator sasaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya diformulasikan ke dalam table berikut ini.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	Pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar siap masuk ke pasar kerja	Peningkatan akses tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, uji sertifikasi kompetensi terhadap berbagai sektor profesi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan beberapa tahun kedepan serta pelatihan / bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
2		Penyempurnaan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan pasar kerja global	Penyesuaian kejuruan di Satpel Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Kerja Palu dengan metode Eliminate, Reduce, Raise dan Create secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan perkembangan Industri maupun perkembangan teknologi industri dimasa datang tetapi juga mendukung pemenuhan tenaga kerja untuk pemamfaatan potensi daerah.	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
3		Pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas, distribusi sarana pembelajaran, dan pelatihan guru kontekstual.	Pembentukan forum kerjasama / nota kesepahaman antar lembaga pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja dengan dunia usaha / industri terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja terlatih.	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah

4		Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, rentan, dan penyandang disabilitas	Penguatan koordinasi dengan segenap jejaring (BPJS dan organisasi pengusaha)	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
5			Peningkatan efektivitas dewan pengupahan provinsi / kabupaten dalam penentuan UMP / UMK dan Upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
6			Meningkatkan pembinaan organisasi pekerja (SP, SB) dan pengusaha	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
7			Penguatan peran fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di tempat kerja.	Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah
8		Mendorong pemberdayaan sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses usaha, dan penguatan kelembagaan sosial berbasis komunitas.		Lokus di semua Kab/Kota di Sulawesi Tengah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja , Target, Indikator dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.

4.1 Uraian Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program menterjemahkan sub urusan yang diampu oleh perangkat daerah.

4.2 Uraian Kegiatan

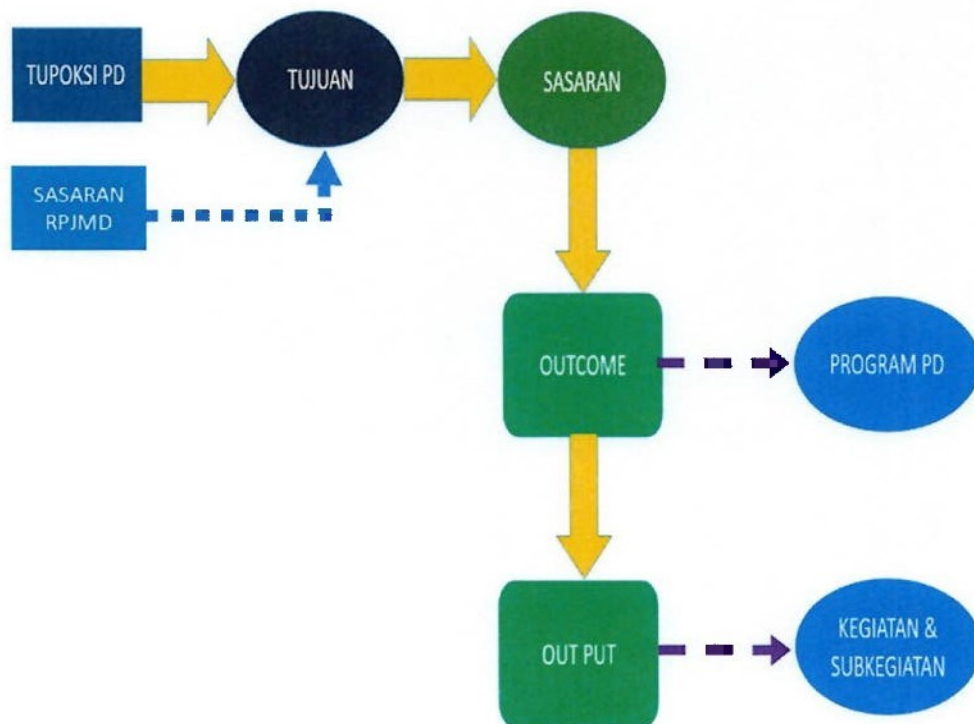
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan enterjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Bagian paling spesifik dari suatu kegiatan, yang merupakan rincian lebih lanjut dari pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Sub Kegiatan menterjemahkan aktivitas/layanan.

Program, kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan , sasaran, outcome dan output, sebagaimana di gambarkan secara skematis dan tabel perumusan arsitektur kinerja dan proses cascading berikut ini.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 : Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya angka partisipasi kerja	Meningkatkan kesejahteraan pekerja				Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)		
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar			Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya Rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah Rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Bidang P5TK Disnakertrans Sulteng
				Tersedianya Dokumen rencana tenaga kerja makro	Jumlah rencana tenaga kerja makro yang tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Terbinanya SDM ketenagakerjaan Kab. / kota dalam menyusun rencana tenaga kerja makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbinanya SDM ketenagakerjaan Kab. / kota dalam menyusun rencana tenaga kerja mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	
				Terbinanya kompetensi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Terakreditasinya Lembaga pelatihan kerja Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terbimbingnya konsultasi produktivitas perusahaan menengah dan UMKM	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan) Jumlah lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi dengan predikat baik dan layak Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi Jumlah perusahaan menengah dan UMKM yang telah mendapatkan bimbingan peningkatan produktivitas	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah dan UMKM Terukurnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Besaran produktivitas tenaga kerja daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terbinanya pelayanan antar kerja daerah Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja) Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah layanan antar kerja yang dibina Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja Pelayanan Antar Kerja	Bidang P5TK Disnakertrans Sulteng

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Terfasilitasinya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang diawasi	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Perluasan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
				Terkelolanya informasi pasar kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
				Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlindunginya PMI pra dan purna penempatan	Persentase PMI purna penempatan yang diberdayakan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan Terfasilitasinya perpanjangan RPTKA	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Jumlah kesepakatan fasilitasi pengesahan RPTKA	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemberdayaan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan	Jumlah Disabilitas yang ditempatkan	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga penyandang disabilitas	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	
				Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Terlaksananya tindak lanjut hasil TLHP pada perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Persentase Hasil Tindakan lanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertata kelolanya administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terealisasinya target penerimaan pendapatan pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Persentase realisasi penerimaan perangkat daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Termonitornya penerapan ASN BerAKHLAK pada perangkat daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terimplementasinya SPBE pada perangkat daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tercatatnya pengadaan barang milik daerah perangkat daerah pada SPSE Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Termonitornya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertatakelolanya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas hubungan industrial		Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terbinanya fasilitasi sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
				Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Persentase perselisihan yang diselesaikan Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	
				Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
				Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
				Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial		Persentase perusahaan yang diawasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
				Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
				Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I				Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
			Terlindunginya hak hak pekerja		Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya di wilayah UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah I	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
				Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan di UPT Wasnaker wilayah I	Jumlah perusahaan yang telah mematuhi hukum ketenagakerjaan di wilayah kerja UPT Wasnaker wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	
				Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Unit kerja		Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	
				Terimplementasinya SPBE pada perangkat daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercatatnya pengadaan barang milik daerah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tertatakelolanya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlindunginya hak hak pekerja		Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya di wilayah UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
				Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan di UPT Wasnaker wilayah II	Jumlah perusahaan yang telah mematuhi hukum ketenagakerjaan di wilayah kerja UPT Wasnaker wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
				Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Unit kerja		Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terimplementasinya SPBE pada perangkat daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercatatnya pengadaan barang milik daerah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Termonitornya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertatakelolanya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kesejahteraan warga transmigran			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya kualitas perkembangan wilayah transmigrasi			Rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)		
					Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)		
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi		Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
				Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
				Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
				Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan		Persentase luas kawasan yang berkembang	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Tertatanya persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi	Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya pada kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	

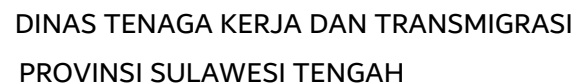
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Transmigrasi	
				Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Transmigrasi	
				Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	
				Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota Terselenggaranya Fasilitas dan Pelatihan Calon Transmigran Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan) Penampungan Provinsi Pelayanan Kesehatan Transmigran Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal) Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terprogramnya pengembangan satuan pemukiman / wilayah transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman / wilayah transmigrasi yang dikembangkan pada tahap pemantapan	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	
				Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	

CASCADING KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Berikut ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif rencana strategis Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tahun 2025 – 2029.

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		RGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
											TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3			4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15
		KETENAGAKERJAAN																					
Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan warga transmigran						Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	Rp	2.728,75			2.810,61		2.894,93		2.981,78		3.071,23		3.163,37		3.258,27		
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar					Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	%	89,80			34,93		35,98		37,06		38,17		39,31		40,49		
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	23,08			23,08	0,00	23,08	216.500.000,00	46,15	233.820.000,00	61,54	252.525.600,00	84,60	272.727.648,00	100,00	313.636.795,00	
		2 07 02	1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah Rencana tenaga kerja (RTK) makro yang tersusun	Dok.	3,00			3,00	0,00	3,00	216.500.000,00	6,00	233.820.000,00	8,00	252.525.600,00	11,00	272.727.648,00	13,00	313.636.795,00	
		2 07 02	1.01	01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah Rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Dok	0,00			0,00		1,00	75.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	87.480.000,00	0,00	94.478.400,00	0,00	121.127.607,00	
		2 07 02	1.01	03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terbinanya SDM ketenagakerjaan Kab. /kota dalam menyusun rencana tenaga kerja makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Org	26,00			0,00		26,00	75.000.000,00	0,00	81.000.000,00	26,00	87.480.000,00	0,00	94.478.400,00	0,00	102.036.672,00	
		2 07 02	1.01	04 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terbinanya SDM ketenagakerjaan Kab. /kota dalam menyusun rencana tenaga kerja mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Org	26,00			0,00		0,00	66.500.000,00	26,00	71.820.000,00	0,00	77.565.600,00	26,00	83.770.848,00	0,00	90.472.516,00	
		2 07 03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	47,00			11,25		11,96	#####	14,50	12.087.500.000,00	16,70	#####	18,85	14.255.827.200,00	20,24	15.316.293.349,00	
		2 07 03	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terbinanya kompetensi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Org	350			400	0,00	500	10.250.000.000,00	700	11.770.000.000,00	850	#####	1050	13.814.928.000,00	1200	14.840.122.240,00	
		2 07 03	1.01	01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Org							10.250.000.000,00		11.500.000.000,00		#####		13.500.000.000,00		14.500.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		2 07 03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Terjalannya koordinasi dan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Lembaga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2 07 03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2 07 03	1.01	04	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	Kesepakatan				0,00		270.000.000,00		291.600.000,00		314.928.000,00		340.122.240,00			
		2 07 03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Terakreditasinya Lembaga pelatihan kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi dengan predikat baik dan layak	LPK	5		7	0,00	10	50.000.000,00	15	101.500.000,00	20	174.960.000,00	25	188.956.800,00	30	204.073.344,00	
		2 07 03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK				50.000.000,00		101.500.000,00		174.960.000,00		188.956.800,00			204.073.344,00		
		2 07 03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Terbimbingnya konsultasi produktivitas perusahaan menengah dan UMKM	Jumlah perusahaan menengah dan UMKM yang telah mendapatkan bimbingan peningkatan produktivitas	Perusahaan	40		50	0,00	60	50.000.000,00	80	108.000.000,00	95	116.640.000,00	110	125.971.200,00	130	136.048.896,00	
		2 07 03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah dan UMKM	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit UMKM				50.000.000,00		108.000.000,00		116.640.000,00		125.971.200,00			136.048.896,00		
		2 07 03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Terukurnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Besaran produktivitas tenaga kerja daerah	Ribu Rupiah	80.000		95.000	0,00	100.000	50.000.000,00	110.000	108.000.000,00	120.000	116.640.000,00	125.000	125.971.200,00	135.000	136.048.869,00	
		2 07 03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dok.				50.000.000,00		108.000.000,00		116.640.000,00		125.971.200,00			136.048.869,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.			
											TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030		
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
		2 07 04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri	%	94,58			52,06		52,06		56,14		60,61		65,56		75,36		
		2 07 04	1.01		Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	Terbinanya pelayanan antar kerja daerah	Jumlah layanan antar kerja yang dibina	Lembaga	6			3	0,00	6	19.649.726.485,00	9	20.855.046.485,00	13	#####	15	22.966.997.333,00	18	23.023.699.001,00	
		2 07 04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Org.						35.000.000,00		37.800.000,00		40.824.000,00		44.089.920,00		47.617.114,00		
		2 07 04	1.01	02	Pelayanan antar kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Org.						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
		2 07 04	1.01	03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Org.						15.000.000,00		16.200.000,00		17.496.000,00		18.895.680,00		20.407.334,00		
		2 07 04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang						16.500.000,00		17.820.000,00		19.245.600,00		20.785.248,00		22.448.068,00		
		2 07 04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Org.						19.583.226.485,00		20.583.226.485,00		21.583.226.485,00		22.583.226.485,00		22.583.226.485,00		
		2 07 04	1.01	06	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Org						0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
			2 07 04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang diawasi	Unit				0,00		10.500.000,00		11.340.000,00		12.247.200,00		13.226.976,00		14.285.134,00	
		2 07 04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
		2 07 04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga						10.500.000,00		11.340.000,00		12.247.200,00		13.226.976,00		14.285.134,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.			
								TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
		2 07 04 1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Terkelolanya informasi pasar kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	Org.	200		300	0,00	500	1.240.000.000,00	350	259.200.000,00	450	279.936.000,00	550	302.330.880,00	700	326.517.350,00	
		2 07 04 1.03 01		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2 07 04 1.03 02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Org.					65.000.000,00		70.200.000,00		75.816.000,00		81.881.280,00		88.431.782,00		
		2 07 04 1.03 03		Job Fair/Bursa Kerja		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Org.					1.175.000.000,00		189.000.000,00		204.120.000,00		220.449.600,00		238.085.568,00		
		2 07 04 1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Terlindungnya PMI pra dan purna penempatan	Persentase PMI purna penempatan yang diberdayakan	%	15		18	0,00	21	128.000.000,00	24	138.240.000,00	26	149.299.200,00	28	161.243.136,00	30	174.142.587,00	
		2 07 04 1.04 01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Org.					60.000.000,00		64.800.000,00		69.984.000,00		75.582.720,00		81.629.338,00		
		2 07 04 1.04 02		Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik		Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	perusahaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		2 07 04 1.04 03		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang					28.000.000,00		30.240.000,00		32.659.200,00		35.271.936,00		38.093.691,00		
		2 07 04 1.04 04		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Org.					40.000.000,00		43.200.000,00		46.656.000,00		50.388.480,00		54.419.558,00		
		2 07 04 1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terfasilitasinya perpanjangan RPTKA	Jumlah kesepakatan fasilitasi pengesahan RPTKA	duk	1		2	0,00	4	25.000.000,00	6	27.000.000,00	6	29.160.000,00	6	31.492.800,00	8	34.012.224,00	
		2 07 04 1.05 01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Org.					25.000.000,00		27.000.000,00		29.160.000,00		31.492.800,00		34.012.224,00		
		2 07 04 1.06		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pemberdayaan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan	Jumlah Disabilitas yang ditempatkan	Org.	10		15	0,00	20	19.614.726.485,00	25	20.817.246.485,00	30	*****	30	22.922.907.413,00	35	22.976.081.887,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)						25,00	35.000.000,00	25,00	37.800.000,00	30,00	40.824.000,00	30,00	44.089.920,00	35,00	47.617.114,00		
		2.07.04	1.06	01	Pelayanan Antar Kerja		Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)						25,00	15.000.000,00	25,00	16.200.000,00	25,00	17.496.000,00	25,00	18.895.680,00	25,00	20.407.334,00		
					Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)						25,00	16.500.000,00	25,00	17.820.000,00	25,00	19.245.600,00	25,00	20.785.248,00	30,00	22.448.068,00		
					Perluasan Kesempatan Kerja		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)							1.000,00	19.583.226.485,00	1.250,00	20.583.226.485,00	1.350,00	21.583.226.485,00	1.450,00	22.583.226.485,00	1.500,00	22.583.226.485,00	
		2.07.04	1.06	02	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD						50,00	0,00	50,00	200.000.000,00	50,00	200.000.000,00	75,00	300.000.000,00	100,00	350.000.000,00		
		2.07.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks Nilai SAKIP		76,35	0,00	78,25	0,00	80,15	33.597.293.324,00	81,50	35.614.521.592,00	82,50	37.631.759.880,00	83,50	40.154.693.109,00	84,00	42.701.435.980,00		
		2.07.01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	%	92,00	0,00	93,00	0,00	93,50	780.500.000,00	94,50	1.014.000.000,00	95,50	1.216.520.000,00	96,50	1.314.241.600,00	97,50	1.483.180.928,00			
		2.07.01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3,00		3,00		3,00		150.000.000,00	3,00	175.000.000,00	3,00	200.000.000,00	3,00	225.000.000,00	3,00	300.000.000,00		
		2.07.01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1,00		1,00		1,00		25.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	50.000.000,00		
		2.07.01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1,00		1,00		1,00		25.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	70.200.000,00	1,00	75.816.000,00		
		2.07.01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1,00		1,00		1,00		25.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	70.200.000,00	1,00	75.816.000,00		
		2.07.01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dok	1,00		1,00		1,00		25.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	70.200.000,00	1,00	75.816.000,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		2.07.01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8,00			8,00		8,00	75.000.000,00	8,00	75.000.000,00	8,00	116.640.000,00	8,00	125.971.200,00	8,00	136.048.896,00		
		2.07.01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00			3,00		3,00	50.000.000,00	3,00	54.000.000,00	3,00	58.320.000,00	3,00	62.985.600,00	3,00		68.024.448,00	
		2.07.01	1.01	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Laporan	1,00			1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00	1,00	174.960.000,00	1,00	188.956.800,00	1,00		204.073.344,00	
		2.07.01	1.01	09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1,00			1,00		2,00	50.000.000,00	2,00	108.000.000,00	3,00	116.640.000,00	3,00	125.971.200,00	3,00		136.048.896,00	
		2.07.01	1.01	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1,00			1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	54.000.000,00	1,00	58.320.000,00	1,00	62.985.600,00			68.024.448,00	
		2.07.01	1.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	2,00			2,00		2,00	50.000.000,00	2,00	54.000.000,00	2,00	58.320.000,00	2,00	62.985.600,00	2,00		68.024.448,00	
		2.07.01	1.01	12	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Laporan	1,00			1,00		1,00	130.500.000,00	1,00	135.000.000,00	1,00	135.000.000,00	1,00	145.800.000,00	1,00		157.464.000,00	
		2.07.01	1.01	13	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	yu	Terkoordinasikann ya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan rah yang Diampu	Laporan	1,00			1,00		1,00	25.000.000,00	1,00	54.000.000,00	1,00	58.320.000,00	1,00	62.985.600,00	1,00		68.024.448,00	
		2.07.01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya tindak lanjut hasil TLHP pada perangkat daerah	Persentase Hasil Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Jenis	95,00	0,00		95,00	0,00	97,00	30.893.793.324,00	95,00	31.387.276.790,00	99,00	#####	99,00	35.224.540.868,00	99,00		36.977.374.109,00	
		2.07.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./bln	100,00			120,00		225,00	30.332.293.324,00	225,00	30.758.876.790,00	225,00	#####	225,00	34.408.111.780,00	225,00		36.139.630.694,00	
		2.07.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	4,00			4,00		4,00	350.000.000,00	4,00	400.000.000,00	4,00	450.000.000,00	4,00	550.000.000,00	4,00		550.000.000,00	
		2.07.01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok.	100,00			120,00		140,00	90.000.000,00	160,00	97.200.000,00	180,00	104.976.000,00		113.374.080,00			122.444.006,00	
		2.07.01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok.	2,00			2,00		2,00	37.000.000,00	2,00	39.960.000,00	2,00	43.156.800,00	2,00	46.609.344,00	2,00		50.338.092,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	dikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.			
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030		
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
		2.07.01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00			1,00		1,00	36.000.000,00	1,00	38.880.000,00	1,00	41.990.400,00	1,00	45.349.632,00	1,00	48.977.603,00		
		2.07.01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok.	2,00			2,00		2,00	10.500.000,00	2,00	11.320.000,00	2,00	12.247.200,00	2,00	13.226.976,00	2,00	14.285.134,00		
		2.07.01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	laporan	14,00			14,00		14,00	38.000.000,00	14,00	41.040.000,00	14,00	44.323.200,00	14,00	47.869.056,00	14,00	51.698.580,00		
		2.07.01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok.	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertata kelolanya administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	95,00	0,00		95,00	1,00	97,00	120.000.000,00	97,00	120.000.000,00	95,00	270.000.000,00	98,00	270.000.000,00	98,00	270.000.000,00		
		2.07.01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	2,00			2,00		2,00	20.000.000,00	2,00	35.000.000,00	2,00	35.000.000,00	2,00	35.000.000,00	2,00	35.000.000,00		
		2.07.01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok.	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1,00			1,00		1,00	0,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	
		2.07.01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Pembinaan, dan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00			1,00		1,00	100.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00		
		2.07.01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3,00			2,00		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		2.07.01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dok.	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Tersedianya target penerimaan pendapatan pada perangkat daerah	Persentase realisasi penerimaan perangkat daerah	%	100,00	0,00		100,00	1,00	100,00	20.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
											TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
		2.07.01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok.	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dok.	1,00		1,00		1,00	13.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	
		2.07.01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Laporan	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1,00		1,00		1,00	7.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	
		2.07.01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termonitornya Kepegawaian ASN BerAKHLAK pada perangkat daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jenis	98,00	0,00	98,00	0,00	99,00	135.000.000,00	99,00	153.600.000,00	100,00	158.288.000,00	100,00	162.151.040,00	100,00	167.283.124,00	
		2.07.01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit / jenis	2,00		2,00		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
		2.07.01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok.	2,00		2,00		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		2.07.01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok.	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok.	2,00		2,00		2,00	100.000.000,00	2,00	115.800.000,00	2,00	117.464.000,00	2,00	118.061.120,00	2,00	119.666.010,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
		2.07.01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Org	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Org	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	orang	1,00		1,00		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00			
		2.07.01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5,00		7,00		7,00	12.000.000,00	7,00	12.960.000,00	7,00	13.996.800,00	7,00	15.116.544,00	7,00	16.325.868,00			
		2.07.01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30,00		30,00		30,00	23.000.000,00	30,00	24.840.000,00	30,00	26.827.200,00	30,00	28.973.376,00	30,00	31.291.246,00			
		2.07.01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25,00		25,00		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00			
		2.07.01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terimplementasinya SPBE pada perangkat daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Angka	60,00	0,00	62,25	0,00	63,50	248.000.000,00	64,50	474.440.000,00	65,50	491.115.200,00	66,50	509.124.416,00	67,50	528.574.369,00			
		2.07.01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4,00		5,00		6,00	20.000.000,00	7,00	29.160.000,00	8,00	31.492.800,00	8,00	34.012.224,00	8,00	36.733.202,00			
		2.07.01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5,00		6,00		7,00	50.000.000,00	8,00	95.040.000,00	9,00	102.643.200,00	9,00	110.854.656,00	9,00	119.723.028,00			
		2.07.01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5,00		6,00		7,00	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00			
		2.07.01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4,00		5,00		6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00			
		2.07.01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12,00		14,00		16,00	28.000.000,00	16,00	30.240.000,00	16,00	32.659.200,00	16,00	35.271.936,00	16,00	38.093.691,00			
		2.07.01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dok.	4,00		5,00		6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00			

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
											TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		2.07.01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jenis /paket	2,00		2,00		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		2.07.01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00		4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
		2.07.01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00		4,00		4,00	100.000.000,00	4,00	216.000.000,00	4,00	216.000.000,00	4,00	216.000.000,00	4,00	216.000.000,00	
		2.07.01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok.	2,00		2,00		2,00	0,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	
		2.07.01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1,00		1,00		1,00	50.000.000,00	1,00	54.000.000,00	1,00	58.320.000,00	1,00	62.985.600,00	1,00	68.024.448,00	
		2.07.01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercatatnya pengadaan barang milik daerah perangkat daerah pada SPSE	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Angka	60,00	0,00	62,25	0,00	63,50	600.000.000,00	64,50	980.773.922,00	65,50	690.000.000,00	66,50	2.705.761.553,00	67,50	6.060.478.471,00	
		2.07.01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	3,00		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1.000.000.000,00	
		2.07.01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	
		2.07.01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.07.01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		2.07.01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	0,00		0,00		5,00	250.000.000,00	10,00	250.000.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	500.000.000,00	
		2.07.01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1,00		5,00		5,00	350.000.000,00	5,00	605.773.922,00	5,00	440.000.000,00	5,00	460.000.000,00		560.000.000,00	
		2.07.01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
		2.07.01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Bervujud		Tersedianya Aset Tak Bervujud	Jumlah Unit Aset Tak Bervujud yang Disediakan	unit	0,00		0,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
		2.07.01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0,00		0,00		1,00	0,00	1,00	125.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	2.245.761.553,00	1,00	2.280.000.000,00	
		2.07.01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	720.478.471,00		
		2.07.01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
		2.07.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Termonitorinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jenis	75,00	0,00	76,50	0,00	78,50	500.000.000,00	80,50	632.000.000,00	82,50	876.640.000,00	83,50	1.031.771.200,00	85,00	1.199.312.896,00	
		2.07.01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00		12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
		2.07.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00		12,00		12,00	400.000.000,00	12,00	432.000.000,00	12,00	466.560.000,00	12,00	503.884.800,00	12,00	544.195.584,00	
		2.07.01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00		4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
		2.07.01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4,00		4,00		4,00	100.000.000,00	4,00	200.000.000,00	4,00	410.080.000,00	4,00	527.886.400,00	4,00	655.117.312,00	
		2.07.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Tertatakelolanya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	jenis	92,00	0,00	94,00	0,00	95,00	300.000.000,00	97,00	722.430.880,00	98,00	835.185.350,00	99,00	907.102.432,00	99,00	985.232.083,00	
		2.07.01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	60,00		60,00		60,00	150.000.000,00	60,00	270.000.000,00	60,00	291.600.000,00	60,00	317.844.000,00	60,00	346.449.960,00	
		2.07.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10,00		10,00		10,00	100.000.000,00	10,00	202.430.880,00	10,00	218.625.350,00	10,00	238.301.632,00	10,00	259.748.779,00	
		2.07.01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.			
								TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
		2.07.01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2.07.01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
		2.07.01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10,00		10,00	10,00	50.000.000,00	10,00	100.000.000,00	10,00	174.960.000,00	10,00	188.956.800,00	10,00	204.073.344,00		
		2.07.01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Bervujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Bervujud	Jumlah Aset Tak Bervujud yang Dipelihara	Unit	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	162.000.000,00	1,00	174.960.000,00		
		2.07.01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
		2.07.01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja					Besarnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	17,34		18,04		18,76		19,51		20,29		21,11		21,94			
		2.07.05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja	%	72,00		73,00		74,00		11.909.886.000,00	75,00	12.416.886.000,00	76,00	13.101.254.000,00	77,00	13.435.763.440,00	78,00	13.847.395.056,00
		2.07.05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	perusahaan	2.057,0		2.194,00		2.331,00		235.000.000,00	2.468,00	351.000.000,00	2.605,00	379.080.000,00	2.742,00	409.406.400,00	2.880	540.920.333,00
		2.07.05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	2.057,0		2.194,00		2.331,00		85.000.000,00	2.468,00	135.000.000,00	2.605,00	145.800.000,00	2.742,00	157.464.000,00	2.880	170.061.120,00

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.													
									TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030																	
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp																
		2 07 05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	perusaha	n	2.057,0			2.194,00			2.331,00			75.000.000,00	2.468,00			108.000.000,00	2.605,00			116.640.000,00	2.742,00			125.971.200,00	2.880		136.048.896,00			
		2 07 05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan		1,00			1,00			1,00			75.000.000,00	1,00			108.000.000,00	1,00			116.640.000,00	1,00			125.971.200,00	1,00		234.810.317,00			
		2 07 05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya pencegahan dan penyelesaian perselisihan yang diselesaikan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi	%	5,00			6,00			7,00			325.000.000,00	8,00			325.000.000,00	9,00			664.008.000,00	10,00			749.528.640,00	11,00		809.490.931,00				
		2 07 05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perkara	100,00			120,00		0,00	130,00			125.000.000,00	140,00			125.000.000,00	150,00			255.768.000,00	160,00			308.629.440,00	170,00		333.319.795,00				
		2 07 05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselaksananya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perkara	50,00			70,00		0,00	80,00		0,00	90,00			0,00	100,00		0,00	110,00		0,00	120,00			0,00	130,00		0,00			
		2 07 05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Asosiasi / serikat pekerja	30,00			30,00		0,00	40,00			0,00	50,00			0,00	60,00		0,00	70,00		0,00	80,00			0,00	90,00		0,00		
		2 07 05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Lembaga	10,00			15,00		0,00	20,00			200.000.000,00	25,00			200.000.000,00	30,00			408.240.000,00	35,00			440.899.200,00	40,00		476.171.136,00				
		2 07 05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusaha	n	100,00			100,00		0,00	120,00			0,00	140,00			0,00	160,00		0,00	180,00		0,00	200,00			0,00	220,00		0,00	
		2 07 05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	SK	11,00			11,00		14,00			11.349.886.000,00	14,00			11.740.886.000,00	14,00			11.224.886.000,00	14,00			12.276.838.400,00	14,00		12.496.983.792,00					
		2 07 05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	S Kep.	1,00			1,00		1,00			125.000.000,00	1,00			216.000.000,00	1,00			333.280.000,00	1,00			251.942.400,00	1,00		272.097.792,00					
		2 07 05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Ditetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	S Kep.	10,00			10,00		13,00		0,00	13,00			0,00	13,00		0,00	13,00		13,00		0,00	13,00			0,00	13,00		0,00		
		2 07 05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org.	264,81			265,000		#####			11.224.886.000,00	#####			11.524.886.000,00	269,000			#####	270,000			12.024.886.000,00	271,000		12.324.886.000,00					

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		ARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
		1 07 06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	%	50,00		51,00	0,00	52,00	550.000.000,00	53,00	810.000.000,00	54,00	874.800.000,00	55,00	944.784.000,00	56,00	1.086.501.600,00		
		1 07 06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	Laporan	240,00		300,00	0,00	350,00	550.000.000,00	400,00	810.000.000,00	450,00	874.800.000,00	500,00	944.784.000,00	550,00	1.086.501.600,00		
UPT WASNAKER WILI		1 07 06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	768,00		890,00		950,00	0,00	1.010,00	0,00	1.070,00	0,00	1.130,00	0,00	1.190	0,00		
		1 07 06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	200,00		300,00		400,00	250.000.000,00	500,00	405.000.000,00	500,00	437.400.000,00	500,00	472.392.000,00	500,0	510.183.360,0		
		1 07 06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	768,00		890,00		950,00	300.000.000,00	1.010,00	405.000.000,00	1.070,00	437.400.000,00	1.130,00	472.392.000,00	1.190,00	576.318.240,0		
					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlindungnya a hak hak pekerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak hak dasarnya di wilayah UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah I	%	65,00	0,00	68,00	0,00	73,00	775.000.000,00	76,00	800.000.000,00	79,00	825.000.000,00	82,00	850.000.000,00	85,00	875.000.000,00		
					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan di UPT Wasnaker wilayah I	Jumlah perusahaan yang telah mematuhi hukum ketenagakerjaan di wilayah kerja UPT Wasnaker wilayah I	Perusahaan	467,00	0,00	540,00	0,00	550,00	775.000.000,00	560,00	800.000.000,00	570,00	825.000.000,00	580,00	850.000.000,00	590,0	875.000.000,00		
					Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	467,00		540,00		550,00	250.000.000,00	560,00	260.000.000,00	570,00	270.000.000,00	580,00	280.000.000,00	590,00	290.000.000,00		
					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	100,00		150,00		200,00	250.000.000,00	250,00	260.000.000,00	250,00	270.000.000,00	250,00	280.000.000,00	250,00	290.000.000,00		
					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	467,00		540,00		550,00	275.000.000,00	560,00	280.000.000,00	570,00	285.000.000,00	580,00	290.000.000,00	590,00	295.000.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Unit kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat		75,00		76,50	0,00	78,50	235.000.000,00	80,50	251.000.000,00	82,50	267.000.000,00	83,50	283.000.000,00	85,00	299.000.000,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terimplementasinya a SPBE pada perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah		60,00		62,50	0,00	63,50	140.000.000,00	64,50	153.000.000,00	65,50	166.000.000,00	66,50	179.000.000,00	67,50	192.000.000,00		
			1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3,00		3,00		3,00	25.000.000,00	4,00	26.000.000,00	4,00	27.000.000,00	4,00	28.000.000,00	4,00	29.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3,00		3,00		3,00	40.000.000,00	3,00	41.000.000,00	3,00	42.000.000,00	3,00	43.000.000,00	3,00	44.000.000,00	
			1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00		2,00		2,00	25.000.000,00	2,00	26.000.000,00	3,00	27.000.000,00	3,00	28.000.000,00	3,00	29.000.000,00	
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00		4,00		4,00	50.000.000,00	4,00	60.000.000,00	4,00	70.000.000,00	4,00	80.000.000,00	4,00	90.000.000,00	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tercatatnya pengadaan barang milik daerah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	jenis	60,00		62,50	0,00	63,50	25.000.000,00	64,50	26.000.000,00	65,50	27.000.000,00	66,50	28.000.000,00	67,50	29.000.000,00	
			1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1,00		2,00		2,00	25.000.000,00	3,00	26.000.000,00	2,00	27.000.000,00	2,00	28.000.000,00	2,00	29.000.000,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertutakelolanya pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	92,00		94,00	0,00	95,00	70.000.000,00	97,00	72.000.000,00	98,00	74.000.000,00	99,00	76.000.000,00	99,00	78.000.000,00	
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	3,00		3,00		3,00	35.000.000,00	3,00	36.000.000,00	3,00	37.000.000,00	3,00	38.000.000,00	3,00	39.000.000,00	
			1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3,00		3,00		3,00	35.000.000,00	3,00	36.000.000,00	3,00	37.000.000,00	3,00	38.000.000,00	3,00	39.000.000,00	
UPT WASNAKER WIL II																								
					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlindungnya hak-hak pekerja		Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya di wilayah UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II	%	70,01	0,00	73,50	0,00	77,18	1.050.000.000,00	81,04	1.080.000.000,00	85,10	1.110.000.000,00	89,39	1.140.000.000,00	93,81	1.170.000.000,00	
					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan di UPT Wasnaker wilayah II	Jumlah perusahaan yang telah mematuhi hukum ketenagakerjaan di wilayah kerja UPT Wasnaker wilayah II	Perusahaan	300,00	0,00	350,00	0,00	400,00	1.050.000.000,00	450,00	1.080.000.000,00	500,00	1.110.000.000,00	550,00	1.140.000.000,00	600,00	1.170.000.000,00	
					Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Terlaksananya Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	300,00		350,00		400,00	350.000.000,00	450,00	360.000.000,00	500,00	370.000.000,00	550,00	380.000.000,00	600,00	390.000.000,00	
					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	100,00		150,00		200,00	350.000.000,00	250,00	360.000.000,00	250,00	370.000.000,00	250,00	380.000.000,00	250,00	390.000.000,00	
					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	300,00		350,00		400,00	350.000.000,00	450,00	360.000.000,00	500,00	370.000.000,00	550,00	380.000.000,00	600,00	390.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Unit kerja		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,00			76,50	0,00	78,50	370.000.000,00	80,50	460.000.000,00	82,50	550.000.000,00	83,50	640.000.000,00	85,00	730.000.000,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terimplementasinya a SPBE pada perangkat daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Angka	60,00			62,50	0,00	63,50	180.000.000,00	64,50	220.000.000,00	66,50	260.000.000,00	67,50	300.000.000,00	67,50	340.000.000,00		
			1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3,00			3,00		3,00	50.000.000,00	3,00	60.000.000,00	3,00	70.000.000,00	3,00	80.000.000,00	3,00	90.000.000,00		
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00			4,00		4,00	100.000.000,00	4,00	110.000.000,00	4,00	120.000.000,00	4,00	130.000.000,00	4,00	140.000.000,00		
			1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3,00			3,00		3,00	10.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	30.000.000,00	4,00	40.000.000,00	4,00	50.000.000,00		
			1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00			2,00		2,00	20.000.000,00	2,00	30.000.000,00	3,00	40.000.000,00	3,00	50.000.000,00	3,00	60.000.000,00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tercatatnya pengadaan barang milik daerah UPT Wasnaker wilayah I pada SPSE	Angka	60,00			62,50	0,00	63,50	30.000.000,00	64,50	40.000.000,00	65,50	50.000.000,00	66,50	60.000.000,00	67,50	70.000.000,00		
			1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1,00			2,00		2,00	30.000.000,00	2,00	40.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	70.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Termonitornya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	Jenis	1,00		1,00	0,00	1,00	100.000.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	140.000.000,00	1,00	160.000.000,00	1,00	180.000.000,00		
			1.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1,00			1,00		1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	80.000.000,00	1,00	90.000.000,00		
			1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	1,00			1,00		1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	80.000.000,00	1,00	90.000.000,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertatakelolanya pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	92,00			94,00	0,00	95,00	60.000.000,00	97,00	80.000.000,00	98,00	100.000.000,00	99,00	120.000.000,00	99,00	140.000.000,00		
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	3,00			3,00		3,00	50.000.000,00	3,00	60.000.000,00	3,00	70.000.000,00	3,00	80.000.000,00	3,00	90.000.000,00		
			1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	3,00			3,00		3,00	10.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	30.000.000,00	3,00	40.000.000,00	3,00	50.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan warga transmigran							Rata-rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)	Ribu rupiah	2.391,67			2.487,33			2.586,83		2.690,30		2.797,91		2.909,8		3.026,22		
	Meningkatnya kualitas perkembangan wilayah transmigrasi						Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	%	50,39			55,00			56,93		58,92		60,98		63,4		65,32		
		3.32.02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	60,00			60,00	0,00		60,00	425.000.000,00	60,00	756.000.000,00	75,00	816.480.000,00	75,00	881.798.400,00	80,00	1.014.068.160,00	
		3.32.02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	Ha	92,00			160,00	0,00		141,00	425.000.000,00	157,00	756.000.000,00	260,00	816.480.000,00	90,00	881.798.400,00	99,00	1.014.068.160,00	
		3.32.02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi nya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	Dok	2,00			2,00			2,00	100.000.000,00	2,00	189.000.000,00	2,00	204.120.000,00	2,00	220.449.600,00	2,00	238.085.568,00	
		3.32.02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kasus	1,00			1,00			1,00	100.000.000,00	1,00	189.000.000,00	1,00	204.120.000,00	1,00	220.449.600,00	1,00	238.085.568,00	
		3.32.02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	92,00			91,00			161,00	125.000.000,00	121,00	189.000.000,00	121,00	204.120.000,00	51,00	220.449.600,00	152,00	299.811.456,00	
		3.32.02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dok	1,00			1,00			1,00	100.000.000,00	1,00	189.000.000,00	1,00	204.120.000,00	1,00	220.449.600,00	1,00	238.085.568,00	
		3.32.03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan yang berkembang	%	23,08			23,08	0,00		30,77	585.000.000,00	46,15	940.000.000,00	61,54	1.373.000.000,00	76,92	1.483.000.000,00	100	1.720.000.000,00	
		3.32.03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tertatanya persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi	Jumlah penduduk yang ditata pesebarannya pada kawasan transmigrasi	KK	68,00	0,00		273,00	0,00		288,00	585.000.000,00	288,00	940.000.000,00	288,00	1.373.000.000,00	288,00	1.483.000.000,00	288,00	1.720.000.000,00	
		3.32.03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1,00			1,00			1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	85.000.000,00	1,00	90.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.			
													TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030		
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
		3.32.03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dok.	1,00			1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	80.000.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	145.000.000,00	1,00	155.000.000,00		
		3.32.03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	KK				0,00		0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	80.000.000,00			
		3.32.03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	25,00			50,00		50,00	50.000.000,00	50,00	70.000.000,00	50,00	80.000.000,00	50,00	85.000.000,00	50,00	90.000.000,00		
		3.32.03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	0,00			0,00		0,00	50.000.000,00	50,00	70.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	140.000.000,00		
		3.32.03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi		Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Org	0,00			150,00		150,00	50.000.000,00	150,00	65.000.000,00	150,00	120.000.000,00	150,00	130.000.000,00	150,00	140.000.000,00		
		3.32.03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	KK	25,00			50,00		50,00	60.000.000,00	50,00	70.000.000,00	50,00	73.000.000,00	50,00	78.000.000,00	50,00	85.000.000,00		
		3.32.03	1.01	08	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Ditakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Ditakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.32.03	1.01	09	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Orang	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.32.03	1.01	10	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)		Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Org.	0,00			0,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
		3.32.03	1.01	12	Penampungan Provinsi		Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditempuh di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK	0,00			0,00		0,00	50.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	175.000.000,00		
		3.32.03	1.01	13	Pelayanan Kesehatan Transmigran		Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.32.03	1.01	16	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi		Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK	13,00			15,00		20,00	50.000.000,00	20,00	65.000.000,00	20,00	75.000.000,00	20,00	85.000.000,00	20,00	95.000.000,00		
		3.32.03	1.01	17	Bantuan Non- Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)		Terlaksananya Pemberian Bantuan Non- Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non- Standar yang Diberikan kepada Transmigran	unit	0,00			3,00		3,00	100.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	320.000.000,00	3,00	335.000.000,00	3,00	480.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	BASE LINE TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
												TAHUN 2025		2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		3.32.03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	3,00		3,00		13,00	50.000.000,00	13,00	115.000.000,00	13,00	125.000.000,00	13,00	130.000.000,00	13,00	140.000.000,00	
		3.32.04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaa n dan kapasitas transmigran dalam pengembang an kawasan transmigrasi		Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	33,33		30,77		38,46		38,46		46,15		46,15		46,15		
		3.32.04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Terprogramnya pengembangan satuan pemukiman / wilayah transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman / wilayah transmigrasi yang dikembangkan pada tahap pemantapan	Unit SP	4,00		4,00	0,00	5,00	673.500.000,00	5,00	673.500.000,00	6,00	950.000.000,00	6,00	1.150.000.000,00	6,00	1.350.000.000,00	
		3.32.04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	150,00		150,00		250,00	300.000.000,00	300,00	300.000.000,00	350,00	500.000.000,00	350,00	650.000.000,00	350,00	750.000.000,00	
		3.32.04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Pemukima n	4,00		4,00		5,00	373.500.000,00	5,00	373.500.000,00	6,00	450.000.000,00	6,00	500.000.000,00	6,00	600.000.000,00	

Palu, 16 September 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Drs. ARYOLU FIRDUS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196511251984031007

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Setiap program prioritas tersebut diampu oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program. Tabel berikut menyajikan persandingan antara 9 Program Prioritas Daerah, program sesuai nomenklatur Kepmendagri, serta perangkat daerah pengampunya. Berikut penjelasan keselarasan program prioritas Pembangunan daerah Sulawesi Tengah dalam RPJMD 2025 – 2029 dengan nomenklatur program / kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tabel berikut.

Tabel 4.4 : Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Berani Cerdas	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
2	Berani Harmoni	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
3	Berani Makmur	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja		

NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Penyuluhan Transmigrasi Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra PD Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dari Pemprov. Sulawesi Tengah yang diturunkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Disnakertrans Provinsi Sulawesi tengah serta untuk menjawab tantangan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pengangguran terdidik Berdasarkan data BPS Sakernas Agustus 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi pada Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan SMA / SMK sebesar 6,78 % diikuti universitas 4,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran adalah pengangguran terdidik dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Sedangkan TPT terendah terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SD kebawah sebesar 1,82 % dan tingkat pendidikan SMP sebesar 2,54 %. Pada sektor formal lebih sulit dimasuki oleh para angkatan kerja karena lebih banyak menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sektor non formal. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang dimiliki.
2. Tidak seimbangny jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan kesempatan kerja berbanding terbalik dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru pada penambahan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah. Akibatnya banyak pengangguran yang dapat memicu bertambahnya permasalahan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

3. Kurangnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tingginya angka pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri (Wirausaha) masih sangat rendah.
4. Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap pekerja, terutama pekerja rentan melalui perlindungan adaptif BPJS Ketenagakerjaan dan fungsi harmonisasi hubungan industrial di Sulawesi Tengah. Banyaknya perselisihan hubungan industrial yang berujung pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari pihak perusahaan membuat para tenaga kerja ini kehilangan mata pencaharian sehingga jumlah pengangguran di Sulawesi Tengah juga akan bertambah.
5. Keterbatasan alokasi program penempatan (kuota) transmigrasi dari pemerintah pusat Berdasarkan data perkembangan dan distribusi transmigran menurut provinsi tujuan, terlihat bahwa minat penduduk dalam melakukan transmigrasi tetap tinggi, namun kuota dari Pemerintah Pusat tidak sesuai atau belum mencukupi dari permohonan penyediaan Kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Disnakertrans Prov. Sulawesi Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tercantum dalam tabel 3.3 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Strategis 2025 – 2029 dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	Ribu Rp	2.810,61	2.894,93	2.981,78	3.071,23	3.163,37	3.258,27	
2	Rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)	Ribu Rp	2.487,33	2.586,83	2.690,30	2.797,91	2.909,83	3.026,22	
3	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	%	34,9284	35,97628	37,05557	38,167	39,3123	40,49162	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	%	18,0369	18,75833	19,50866	20,289	21,1006	21,94459	
5	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	%	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,32	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. IKK memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian suatu kebijakan atau program, serta menunjukkan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki. IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Berikut IKK yang diampu oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,25 - 2,94	2,22 - 2,75	2,18 - 2,74	2,15 - 2,73	2,09 - 2,72	2,05 - 2,71	
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	30,33 - 33,86	33,50 - 37,90	36,66 - 39,6	39,83 - 42,8	42,99 - 45,95	43,15-46,95	
3	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	%	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,02	56,2	57,38	58,56	59,74	60,15	
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	96,90	97,15	97,30	97,45	98,00	98,55	
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	163,00	158,00	153,00	148,00	143,00	138,00	
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	65,92	67,90	69,93	72,03	74,19	76,35	
8	Keselamatan dan perlindungan	%	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani	%	92,00	93,10	94,22	95,35	96,50	97,64	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	45,00	48,60	52,49	56,69	61,22	65,76	
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	90,00	92,25	94,56	96,92	99,34	100,00	
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	90,00	91,80	93,64	95,51	97,42	99,33	
13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK	%	86,00	87,72	89,47	91,26	93,09	94,91	
14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja	%	67,00	69,01	71,08	73,21	75,41	77,61	
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,00	72,72	73,45	74,18	74,92	75,67	
16	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi	Angka	52,50	53,81	55,16	56,54	57,95	59,36	
17	Jumlah KK transmigran yang di bina	KK	400,00	440,00	484,00	532,00	586,00	639,00	

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja). Selanjutnya kepada seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk senantiasa mengerahkan segenap daya upaya dan kepeduliannya dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini.

Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten / Kota se-Sulawesi Tengah akan adanya pensinergian program sehingga apa yang disajikan dalam Rencana Srategis ini dapat terealisasi.

Pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang

mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Selama beberapa kurun waktu ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode berikutnya.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu penjabaran RPJMD 2025 – 2029 Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur ***“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025 - 2029”***

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya bagi kita semua. Aamiin.

